

**SKRIPSI**

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN  
KELOMPOK MASYARAKAT PENGELOLA SAMPAH  
DI KOTA MAKASSAR**

Disusun oleh dan diusulkan oleh:

Zulfahmi

Nomor Stambuk : 105640156011



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR  
2018**

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN  
KELOMPOK MASYARAKAT PENGELOLA SAMPAH  
DI KOTA MAKASSAR**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

Zulfahmi

Nomor Stambuk : 105640156011

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR  
2018**

## PERSETUJUAN

Judul Skripsi: : Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan  
Kelompok Masyarakat Pengelola Sampah di Kota  
Makassar

Nama Mahasiswa : Zulfahmi

Nomor Stambuk : 105640156011

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. H. Lukman Hakim, M.Si

Pembimbing II



Handam, S.Ip., M.Si

Mengetahui,

Dekan  
FISIP Unismuh Makassar



Dr. Hiyani Malik, S.Sos., M.Si

Ketua Jurusan  
Ilmu Pemerintahan



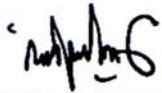
Dr. Nuryanti Mustari, S.Ip., M.Si

## PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan Menguji Ujian Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 1342/FSP/A.1-VIII/VIII/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Jumat tanggal 31 bulan Agustus Tahun 2018.

## TIM PENILAI

Ketua



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

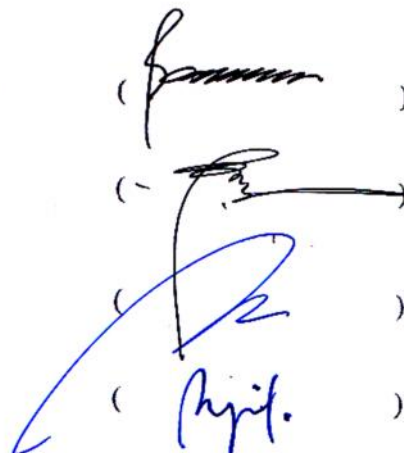
Sekretaris

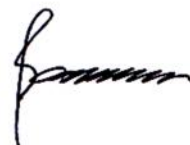



Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si


Penguji:

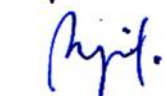
1. Dr. H. Lukman Hakim, M.Si (Ketua)
2. Adnan Ma'ruf, S.Sos, M.Si
3. Rudi Hardi, S.Sos, M.Si
4. Handam, S.IP, M.Si



()

()

()

()

## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Zulfahmi

Nomor Stambuk : 105640156011

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya tulis ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 09 Oktober 2018  
Yang Menyatakan

Zulfahmi

## ABSTRAK

### **Zulfahmi. *Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengelola Sampah di Kota Makassar.***

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan kelompok masyarakat pengelola sampah di kota makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dari hasil wawancara 6 orang dapat ditarik kesimpulan bahwa tanggapan informan tentang peran pemerintah dalam pemberdayaan kelompok masyarakat pengelolaan sampah..

Peran pemerintah dalam pengelolaan sampah tentang peran pemerintah daerah dalam mengelola sampah sudah cukup baik tinggal ditingkatkan lagi cara mengelolanya. Peran pemerintah sebagai fasilitator dalam pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah tentang peran pemerintah dalam mengelola sampah pada intinya sudah baik, terkadang masih ada program yang belum berjalan dengan baik. Peran pemerintah sebagai dinamisor dalam pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah tentang kelompok masyarakat pengelola sampah sudah berjalan dengan baik. Peran pemerintah sebagai regulator dalam pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah tentang faktor pendukung yaitu pemerintah dalam hal ini masih belum efektif dalam program yang dilakukan namun pada umumnya sudah berjalan dengan baik

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tanggapan informan tentang peran pemerintah dalam pemberdayaan kelompok masyarakat pengelolaan sampah. Hal ini sama dengan teori dimana salah satu masyarakat yang harus diberdayakan adalah masyarakat pemulung, karena sumber daya manusia pemulung dalam upaya peningkatan kualitas baik manusia sebagai insan maupun sebagai sumber daya pembangunan terasa semakin penting

Kata Kunci : *Peran Pemerintah, Pengelolaan Sampah di Kota Makassar.*

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tiada kata yang terindah dan teragung selain mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas petunjuk dan bimbingan-Nya, sehingga skripsi ini yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengelolaan Sampah di Kota Makassar” dapat di selesaikan oleh penulis walaupun jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kepada pembaca yang budiman, agar dapat memberikan masukan dan kritikan yang bersifat membangun demi perbaikan dan kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak DR. H. Lukman Hakim, M.Si sebagai pembimbing I dan bapak Handam, S.IP.,M.Si sebagai pembimbing II, yang telah mengarahkan dan membimbing penulis sejak pengusulan judul sampai kepada penyelesaian skripsi ini. Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Dr. Abd. Rahman Rahim, M.Si
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
3. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Dr. Nuryanti Mustari, S.Ip., M.Si yang telah membina Jurusan Ilmu Pemerintahan

4. Dosen Fisipol, Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah banyak membantu penulis selama menempuh pendidikan di kampus ini.
5. Terkhusus kepada kedua orang tua dan keluarga penulis yang membantu penulis berupa materi maupun non materi.
6. Teman-teman seperjuangan yang telah banyak memberi saran, dukungan, dan motivasi kepada penulis.
7. Teman-teman kelas ilmu yang banyak memberi ide atau pikiran kritikan yang bersipat membangun.

Semoga bantuan semua pihak senantiasa mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT, Amin.

Makassar, 09 Oktober 2018

Zulfahmi



## DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi .....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Penerimaan TIM .....	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi .....	iv
Abstrak .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi.....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Konsep Peran Pemerintah Daerah.....	14
1. Kelompok Sosial .....	15
2. Pengelolaan Sampah .....	16
3. Pengertian Pemerintah Daerah.....	17
B. Konsep Tentang Pemberdayaan Masyarakat .....	20
1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat .....	20
2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat .....	23
3. Peran Pemberdayaan Masyarakat .....	25

C. Konsep Pengelolaan Sampah .....	26
1. Pengertian .....	26
2. Jenis dan Sumber .....	28
3. Sistem Pengelolaan Sampah .....	30
4. Aspek Pengelolaan Sampah .....	32
5. Kota Berwawasan Lingkungan .....	37
6. Pemberdayaan Kelompok Pengelola Sampah .....	38
D. Kerangka Pikir .....	39
E. Fokus Penelitian .....	40
F. Deskripsi Fokus Penelitian .....	40
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	42
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	42
C. Jenis dan Sumber Data .....	42
D. Teknik Pengumpulan Data .....	43
E. Informan .....	44
F. Teknik Analisa Data .....	45
G. Keabsahan Data .....	46
 <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi Objek Penelitian .....	47
B. Hasil Penelitian .....	57
C. Pembahasan .....	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	72
DAFTAR PUSTAKA .....	74
LAMPIRAN .....	76

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Secara mendasar salah satu tugas dan kewajiban pemerintah adalah untuk mensejahterakan rakyat sesuai dengan Undang–Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, dalam mensejahterakan rakyat pemerintah harus menjalankan perannya baik sebagai fasilitator, dinamisator, regulator, motivator, dan kasalitor.

Untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan membina peran serta masyarakat secara terarah diperlukan program yang dilaksanakan secara intensif dan berorientasi kepada penyebar luasan pengetahuan, penanaman kesadaran, peneguhan sikap dan pembentukan perilaku serta Pengembangan peran serta masyarakat dibidang kebersihan diterapkan dengan pendekatan secara edukatif dengan strategi 2 tahap, yaitu pengembangan petugas dan pengembangan masyarakat. Kunci pengembangan petugas ialah keterbukaan, dan pengembangan komunikasi timbal balik (unsur petugas sendiri, antara petugas dan atau masyarakat dan atau anggota masyarakat), horizontal maupun vertikal. Kunci pengembangan masyarakat ialah pengembangan kesamaan persepsi, antara masyarakat dan petugas. Suatu komunikasi dikatakan berhasil, bila menimbulkan umpan balik dan pesan yang diberikan

Pembinaan masyarakat dalam pengelolaan sampah adalah dengan melakukan perubahan bentuk perilaku yang didasarkan pada kebutuhan atas

kondisi lingkungan yang bersih yang pada akhirnya dapat menumbuhkan dan mengembangkan peran serta masyarakat dalam bidang kebersihan. Perubahan bentuk perilaku masyarakat dapat terwujud perlu ada usaha membangkitkan masyarakat dengan mengubah kebiasaan sikap dan perilaku terhadap kebersihan/sampah tidak lagi didasarkan kepada keharusan atau kewajibannya, tetapi lebih didasarkan kepada nilai kebutuhan. Untuk mengubah kebiasaan tersebut, maka diperlukan pembinaan terhadap peran serta masyarakat yang dilakukan secara menyeluruh (kalangan pemerintah, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat biasa) dan terpadu (pengelola dan seluruh masyarakat). Pembinaan terhadap peran serta masyarakat harus dilakukan secara terus menerus, terarah, terencana dan berkesinambungan, serta dengan melibatkan berbagai unsur terkait

Kegagalan dan keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditentukan oleh kemampuan semua pihak yang terlibat dalam proses pengembangan masyarakat untuk memahami realitas masyarakat. Pentingnya pembangunan dan pemberdayaan ini merupakan mekanisme pembangunan nasional yang menjadikan masyarakat pada akhirnya berperan sebagai pelaku utama kegiatan pembangunan, mulai dari perancangan, pelaksanaan, sampai evaluasi dan tindak lanjut.

Proses pemberdayaan masyarakat merupakan suatu program yang berkesinambungan. Pemberdayaan masyarakat mengandung arti mengembangkan kondisi dan situasi sedemikian rupa sehingga masyarakat memiliki daya dan kesempatan untuk mengembangkan kehidupannya.

Pemberdayaan masyarakat menyangkut dua kelompok yang saling terkait yaitu masyarakat yang belum berkembang sebagai pihak yang harus diberdayakan, dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.

Sejalan dengan reformasi maka perhatian pemerintah pada masyarakat miskin khususnya pada pemulung, mendapat prioritas utama. Di samping itu, mahal nya biaya hidup tersebut di pasaran diyakini akibat lemahnya perlindungan pemerintah terhadap masyarakat pemulung. Untuk itu diharapkan peranan dari pemerintah daerah baik pemerintah Provinsi maupun pemerintah Kabupaten. Harapan tersebut terutama dalam memberdayakan kelompok masyarakat pengelolaan sampah di kota Makassar. Pentingnya pemberdayaan ini tidak lepas pula dari kondisi kehidupan masyarakat yang mendambakan hidup sejahtera yakni kehidupan yang akan datang lebih baik dari kehidupan sekarang.

Menyimak uraian tersebut di atas, maka perlu penelitian tentang bagaimana upaya pemerintah daerah dalam memberdayakan kelompok masyarakat pengelolaan sampah di kota Makassar. Partisipasi, sebagai suatu konsep dalam pengembangan masyarakat, digunakan secara umum dan luas. Partisipasi adalah konsep sentral dan prinsip dasar dari pengembangan masyarakat karena di antara banyak hal, partisipasi terkait erat dengan gagasan HAM.

Sampah pada dasarnya merupakan suatu bahan yang terbuang atau di buang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia maupun proses-proses alam yang tidak mempunyai nilai ekonomi, bahkan dapat mempunyai nilai ekonomi

yang negatif karena dalam penanganannya baik untuk membuang atau membersihkannya memerlukan biaya yang cukup besar.

Dalam Undang-Undang No.18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dinyatakan definisi sampah sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Sampah adalah sesuatu yang tidak berguna lagi, dibuang oleh pemiliknya atau pemakai semula.

Regulai dalam pengelolaan sampah kota yaitu menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi, menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah, melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain, menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya. Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan system tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan peraturan menteri.

Peraturan Pemerintah Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah bahwa pengelolaan sampah selama ini belum menerapkan prinsip *reduce, reuse, dan recycle* sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, bahwa pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf a Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah bertugas menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* Melalui Bank Sampah.

Keberadaan sampah dalam jumlah yang banyak jika tidak dikelola secara baik dan benar, maka akan menimbulkan gangguan dan dampak terhadap lingkungan, baik dampak terhadap komponen fisik kimia (kualitas air dan udara), biologi, sosial ekonomi, budaya dan kesehatan lingkungan. Dampak operasional TPA terhadap lingkungan akan memicu terjadinya konflik



sosial antar komponen masyarakat. Pada tahap pembuangan akhir/pengolahan, sampah akan mengalami pemrosesan baik secara fisik, kimia maupun biologis sedemikian hingga tuntas penyelesaian seluruh proses pengelolaan sampah.

Sampah merupakan barang sisa atau buangan yang memang sudah tak bisa dipakai lagi. Tentunya, sampah sangat merugikan apabila tidak dikelola secara saniter (baik dan sehat) karena akan mengakibatkan pengotoran lingkungan, pencemaran terhadap sumber air, tanah, tempat berkembangbiaknya bibit penyakit, dan bisa sebagai penyumbat air yang bisa menimbulkan banjir. Tak hanya itu, sampah pun bisa merusak keindahan kota dan dapat menimbulkan bau yang tidak sedap. (polusi sampah). Manusia bisa menghasilkan sampah antara 2,5 hingga 3 kubik/ rumah tangga/hari sehingga dapat dibayangkan berapa kubik sampah yang dihasilkan per harinya. Pengelolaan sampah di suatu daerah akan membawa pengaruh bagi masyarakat maupun lingkungan di daerah itu sendiri. Pengaruhnya tentu saja ada yang positif dan ada juga yang negatif.

Pengaruh positif disini, artinya sampah dengan sistem pengelolaan sampah yang baik akan memberikan pengaruh yang positif terhadap masyarakat maupun lingkungannya, diantaranya; Sampah dapat dimanfaatkan untuk menimbun lahan semacam rawa-rawa dan dataran rendah, sampah dapat dimanfaatkan sebagai pupuk, dapat diberikan untuk makanan ternak setelah menjalani proses pengelolaan yang telah ditentukan lebih dahulu untuk mencegah pengaruh buruk sampah tersebut terhadap ternak. Pengelolaan sampah yang kurang baik dapat memberikan pengaruh negatif yaitu *Pertama*,

pengaruh terhadap kesehatan, diantaranya pengelolaan sampah yang kurang baik akan menjadikan sampah sebagai tempat perkembangbiakan vektor penyakit (seperti lalat, tikus, serangga, jamur); penyakit saluran pencernaan (diare, kolera dan typhus) disebabkan banyaknya lalat yang hidup berkembang biak di sekitar lingkungan tempat penumpukan sampah, insidensi penyakit kulit meningkat karena penyebab penyakitnya hidup dan berkembang biak di tempat pembuangan dan pengumpulan sampah yang kurang baik, penyakit sesak nafas dan penyakit mata disebabkan bau sampah yang menyengat yang mengandung *Amonia Hydrogen, Sulfide dan Methylmercaptan* dan lain sebagainya.

*Kedua*, pengaruh terhadap lingkungan, diantaranya pengelolaan sampah yang kurang baik menyebabkan estetika lingkungan menjadi kurang sedap dipandang mata misalnya banyaknya tebaran-tebaran sampah sehingga mengganggu kesegaran udara lingkungan masyarakat, pembuangan sampah ke dalam saluran pembuangan air akan menyebabkan aliran air akan terganggu dan saluran air akan menjadi dangkal, dan proses pembusukan sampah oleh mikroorganisme akan menghasilkan gas-gas tertentu yang menimbulkan bau busuk, adanya asam organik dalam air serta kemungkinan terjadinya banjir maka akan cepat terjadinya pengerusakan fasilitas pelayanan masyarakat. Kemudian, pembakaran sampah dapat menimbulkan pencemaran udara dan bahaya kebakaran lebih luas; jika musim hujan datang, sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir dan mengakibatkan pencemaran pada sumber air permukaan atau sumur dangkal.

*Ketiga*, pengaruh terhadap sosial ekonomi dan budaya masyarakat. Pengelolaan sampah yang kurang baik mencerminkan keadaan sosial-budaya masyarakat setempat., keadaan lingkungan yang kurang baik dan jorok, akan menurunkan minat dan hasrat orang lain (turis) untuk datang berkunjung ke daerah tersebut, dapat menyebabkan terjadinya perselisihan antara penduduk setempat dan pihak pengelola, angka kesakitan meningkat dan mengurangi hari kerja sehingga produktifitas masyarakat menurun.

Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumberdaya yang perlu dan dapat dimanfaatkan. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya untuk energi, kompos ataupun untuk pupuk.

Dalam konteks ini, memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga cukup penting. Sebab, hakikatnya sampah dihasilkan oleh masyarakat itu sendiri. Salah satu yang dapat dilakukan masyarakat untuk berperan serta mengelola sampah dan melestarikan lingkungan adalah meninggalkan pola lama dalam mengelola sampah domestik (rumah tangga) seperti membuang sampah di sungai dan pembakaran sampah, dengan menerapkan prinsip 4R yakni, *reduce* (mengurangi), *reuse* (menggunakan kembali), *recycle* (daur ulang) dan *replace* (mengganti) serta melakukan pemisahan sampah organik dan sampah an-organik.

Prinsip *reduce* mempunyai arti bahwa masyarakat bisa berusaha lebih sedikit dalam memproduksi sampah, setiap berbelanja membawa plastik

sendiri dari rumah, sehingga mengurangi penggunaan plastik. Sedangkan reuse (menggunakan kembali suatu produk untuk tujuan yang sama), yaitu memanfaatkan wadah-wadah bekas yang dapat dipakai seperti gallon, botol-botol bekas atau kaleng-kaleng bekas, dan *recycle* untuk menerapkan prinsip mendaur ulang, diantaranya bisa dengan membuat kompos dari sampah organik, pot-pot dari barang bekas plastik-plastik, ataupun kreatifitas yang lain sehingga sampah-sampah bisa didaur ulang dan bisa dimanfaatkan kembali. Sementara mempunyai arti mengganti bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan dengan bahan yang lebih ramah lingkungan.

Peraturan Daerah No 4 Tahun 2011 menyatakan bahwa pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya, disamping itu untuk terciptanya kondisi lingkungan yang bersih maka pemerintah maupun masyarakat agar senantiasa menjaga kondisi lingkungan sekitar sehingga tata kelola masyarakat akan baik dan bisa menjadi acuan kepada daerah lain sebagai daerah percontohan dalam tata kelola persampahan khususnya di kota Makassar.

Umumnya kesadaran masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sampah organik maupun non-organik masih kurang. Terbukti dengan banyaknya sampah yang dibuang sembarangan atau dibakar yang cukup beresiko terhadap kesehatan dan lingkungan sekitar. Disamping itu program pemerintah Makassar tidak rantasa' yang mempunyai dua permasalahan yang tidak efektif diantaranya : gendang dua dan pengangkutan sampah di

masyarakat. Program gendang dua yang dilaksanakan pemerintah dinilai gagal karena hampir sebagian tempat sampah gendang dua yang disebar diwilayah kota Makassar sudah rusak dan kebanyakan masyarakat setempat lebih memilih mengangkut sampahnya ke tempat penampungan sampah dan mengenai pengangkutan sampah, mobil angkutan dinilai masih kurang karena tidak dapat mengangkut sampah sehingga banyak sampah yang masih berserakan disekitar lingkungan masyarakat itu sendiri. Kebijakan Makassar Tidak Rantasa merupakan kebijakan yang mengatur tentang tata kebersihan Kota dimulai dari kesadaran semua warga Kota Makassar untuk mengedepankan aspek kebersihan dalam kehidupan sehari-hari. Menindaklanjuti kebijakan tersebut, walikota Makassar mengingatkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) nya agar tidak saling mengharap dalam program ini. SKPD hingga camat dan lurah se-Kota Makassar wajib membersihkan ketika mendapati sampah.“ Ditekankan pula kepada Dinas Kebersihan, untuk lebih memaksimalkan fungsi truk angkutan yang dimiliki, dan juga kesejahteraan para pelaku persampahan.

Kebijakan penanggulangan kebersihan yang dilaksanakan selama ini seperti melaksanakan sosialisasi tentang pentingnya kebersihan dan manfaatnya terhadap kesehatan sebagai langkah antisipatif agar timbulnya penyakit dapat dihindari serta dapat memberikan manfaat terhadap keindahan Kota. Namun hal tersebut sepertinya belum maksimal dikarenakan masih banyaknya sampah yang sering dijumpai disekitar kita. Hal tersebut terjadi disebabkan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk

meningkatkan pola hidup sehat Salah satu upaya dalam pengelolaan sampah dengan konsep pemberdayaan masyarakat yaitu dengan membentuk “Bank Sampah” di lingkungan masyarakat.

Bank Sampah merupakan konsep pengumpulan sampah kering dan dipilah serta memiliki manajemen layaknya perbankan tapi yang ditabung bukan uang melainkan sampah. Masyarakat yang menabung yang juga disebut nasabah memiliki buku tabungan dan dapat meminjam uang yang nantinya dikembalikan dengan sampah seharga uang yang dipinjam. Sampah yang ditabung ditimbang dan dihargai dengan sejumlah uang nantinya akan dijual di pabrik yang sudah bekerja sama. Sedangkan plastik kemasan dibeli ibu-ibu PKK setempat untuk didaur ulang menjadi barang-barang kerajinan. Pengelolaan sampah dengan konsep “Bank Sampah” merupakan strategi dalam membangun kepedulian masyarakat agar dapat berteman dengan sampah untuk mendapatkan manfaat ekonomi langsung dari sampah. Bank sampah juga dapat dijadikan solusi untuk mencapai pemukiman yang bersih dan nyaman bagi warganya. Salah satu bank sampah unit yang akan kami teliti adalah bank sampah unit dahlia II dan pelita bangsa. Dengan pola ini maka masyarakat selain menjadi disiplin dalam mengelola sampah juga mendapatkan tambahan pemasukan dari sampah-sampah yang mereka kumpulkan.

Masalah dalam pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendaur ulangan, sedangkan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan,

pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir. Pada dasarnya masalah sampah tidak bisa diselesaikan hanya oleh Pemerintah saja. Sudah saatnya sebagai penghasil sampah ikut membantu, bahkan ikut bertanggung jawab dengan mengurus sampahnya sendiri

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan diperoleh bahwa sampah yang ada di Kota Makassar sudah dikelompokkan masing-masing kecamatan yang dikelola oleh bank sampah masing – masing kelurahan.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengelolaan Sampah di Kota Makassar”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas yang terdapat pada latar belakang maka berikut dirumuskan tentang permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana peran pemerintah dalam pemberdayaan kelompok masyarakat pengelola sampah di Kota Makassar”?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang muncul dengan latar belakang seperti yang diuraikan. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran pemerintah dalam pemberdayaan kelompok masyarakat pengelola sampah di Kota Makassar.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan dari segi keilmuan/akademis:
  - a. Memperluas dan memperbanyak khazanah ilmiah keilmuan tentang pemberdayaan masyarakat pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya yang dapat dijadikan acuan dalam pengembangan sumber daya manusia.
  - b. Menjadikan pendorong bagi studi lebih lanjut untuk mengembangkan model pemberdayaan masyarakat dalam cakupan yang lebih luas.
2. Kegunaan dari segi praktis:
  - a. Untuk mengetahui apa sebenarnya faktor penghambat dan pendukung dalam pemberdayaan kelompok masyarakat pengelolaan sampah di kota Makassar.
  - b. Menuangkan minat penulis yang ingin mengungkap mengenai peran pemerintah daerah mengenai pengelolaan sampah di Kota Makassar



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Peran Pemerintah Daerah**

Dalam melakukan peranan, masyarakat biasanya memberi fasilitas-fasilitas pada individu untuk dapat menjalankan peranan. lembaga-lembaga kemasyarakatan merupakan bagian masyarakat yang banyak menyediakan peluang-peluang untuk melaksanakan peranan. Selanjutnya dikatakan bahwa didalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan perannya atau kewajiban-kewajibannya. Peranan-peranan dapat dilihat sebagai bagian dari struktur masyarakat sehingga struktur masyarakat dapat dilihat sebagai pola-pola peranan yang saling berhubungan (Soekanto, 2013:213).

Menurut After dalam Inu Kencana (2015:23) pemerintah itu merupakan satuan anggota yang paling umum yaitu memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya, dan monopoli praktis mengenai kekuasaan paksaan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama dalam studi ilmu politik gejala pemerintahan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari usaran kekuasaan. Bahkan menurut Kuper dalam Muhadam (2013:31)

istilah *government* (pemerintah) dan segala bentuk merupakan jantung dari ilmu studi politik.

Sedangkan pemerintah menurut *Finer* dalam Muhadam (2013:14) setidaknya menunjukkan empat pengertian pokok yaitu pertama pemerintah merujuk suatu proses pemerintahan dimana kekuasaan dioperasionalkan oleh mereka yang memegang kekuasaan secara sah. Semua proses yang berlangsung dalam bingkai pengelolaan kekuasaan dipandang merupakan aktivitas yang menunjukkan pada performa pemerintah. Realitas ini dapat dilihat ketika seseorang menyadari bahwa semua aktivitas keteraturan dan ketertiban hingga urusan yang berbelit-belit dalam birokrasi merupakan mekanisme yang didesain secara sengaja oleh pemerintah. Kedua istilah pemerintah menunjuk pada keberadaan dimana proses pemerintahan tersebut berlangsung. Ketiga pemerintah menunjuk secara langsung person Keempat pemerintah juga dapat mengacu pada aspek bentuk, metode atau sistem pemerintah dalam suatu masyarakat, yakni struktur dan pengelolaan badan pemerintah serta hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah

### **1. Kelompok Sosial**

Kelompok social adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Kelompok diciptakan anggota masyarakat Kelompok juga dapat memengaruhi perilaku para anggotanya.

Menurut *Robert Bierstedt* kelompok memiliki banyak jenis dan dibedakan berdasarkan ada tidaknya organisasi, hubungan sosial antara

kelompok, dan kesadaran jenis. *Bierstedt* kemudian membagi kelompok menjadi empat macam:

- a. Kelompok statistik, yaitu kelompok yang bukan organisasi tidak memiliki hubungan sosial dan kesadaran jenis di antaranya. Contoh: Kelompok penduduk usia 10-15 tahun di sebuah kecamatan .
- b. Kelompok kemasyarakatan, yaitu kelompok yang memiliki persamaan tetapi tidak mempunyai organisasi dan hubungan sosial di antara anggotanya.
- c. Kelompok sosial, yaitu kelompok yang anggotanya memiliki kesadaran jenis dan berhubungan satu dengan yang lainnya, tetapi tidak terikat dalam ikatan organisasi. Contoh: Kelompok pertemuan, kerabat.
- d. Kelompok asosiasi, yaitu kelompok yang anggotanya mempunyai kesadaran jenis dan ada persamaan kepentingan pribadi maupun kepentingan bersama. Dalam asosiasi, para anggotanya melakukan hubungan sosial, kontak dan komunikasi, serta memiliki ikatan organisasi formal.

## **2. Pengelolaan Sampah**

Pengelolaan sampah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan daur ulang atau pembuangan dari material sampah. Kalimat ini biasanya mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia, dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, atau estetika. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam (*resources recovery*). Pengelolaan sampah

bisa melibatkan zat padat, cair, gas, atau radioaktif dengan metode dan keterampilan khusus untuk masing-masing jenis zat. Praktik pengelolaan sampah berbeda beda antara negara maju dan negara berkembang, berbeda juga antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan dan antara daerah perumahan dengan daerah industri. Pengelolaan sampah yang tidak berbahaya dari pemukiman dan institusi di area metropolitan biasanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sedangkan untuk sampah dari area komersial dan industri biasanya ditangani oleh perusahaan pengolah sampah. Metode pengelolaan sampah berbeda-beda tergantung banyak hal, di antaranya tipe zat sampah, lahan yang digunakan untuk mengolah, dan ketersediaan lahan. dan adapun Tujuan Pengelolaan sampah merupakan proses yang diperlukan. Proses pemilahan sampah yang masih memiliki nilai secara materiil untuk digunakan kembali disebut sebagai daur ulang (*reuse*). Ada beberapa cara daur ulang, pertama adalah mengambil bahan sampahnya untuk diproses lagi atau mengambil energi dari bahan yang bisa dibakar.

### **3. Pengertian Pemerintah Daerah**

Untuk menjalankan tugas negara sehari-hari, maka dibentuklah pemerintah. Pemerintah sebagai personafikasi negara berupaya sedapat mungkin untuk mewujudkan tugas dan tujuan negara menjadi kenyataan dan sebagai personafikasi atau alat pemerintah adalah birokrasi pemerintah sebagai pelaksana jabatan karier.

Birokrasi pemerintah ditingkat pusat disebut kementerian negara beserta jajarannya yang membantu fungsi kekuasaan eksekutif yaitu presiden sebagai kepala negara dan kepalah pemerintahan. Yang mewujudkan fungsi eksekutif sehari-hari adalah birokrasi pemerintah, sehingga peranan birokrasi menjadi penting. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Thoha dalam Sembiring (2012:1), bahwa: peran birokrasi menjadi mengemuka karena didalam masyarakat sudah berkembang penguasa-penguasa politik yang telah mendelegasikan urusan-urusan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pada birokrasi dan bahkan mengantunkannya pada infrastruktur birokrasi. Oleh karena posisinya yang strategis dan mempunyai keahlian profesional dalam fungsinya, serta mekanisme perencanaan dan pelaksanaan kebijakan erat sekali, maka peranan birokrasi dalam "*public policy*" sangat penting.

Sedangkan menurut W.S. Sayre dalam Inu Kencana (2014:6), mengatakan bahwa: *Government is best as the organized agency of the state, expressing and exercising its authority.*

Maksudnya pemerintah dalam defenisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaanya. Dalam hal ini terhadap rakyatnya secara keseluruhan.

Menurut Wilson dalam Inu Kencana (2012:12) pemerintahan pada akhir uraiannya, adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok. Orang yang dipersiapkan

oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud-maksud bersama mereka, dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan.

Pemerintah daerah merupakan suatu bagian, suatu wilayah hukum dari pada negara yang tidak mempunyai kekuasaan *power/authority* yang lain dari pada yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat (negara), dan apabila daerah otonom itu keluar dari batas kewenangan yang telah diberikan melalui peraturan perundang-undangan maka daerah otonom itu dapat dikejar terus oleh pemerintah pusat (negara) sebagai kekuasaan lebih tinggi.

Pemerintah daerah adalah kepala daerah yang selanjutnya disebut daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan

*Bachtiar* (2012) adalah merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia dikatakan menjalankan suatu peranan. Sedangkan, menurut Undang-Undang No. 32/2004 pasal 217, dalam menjalankan peran dari pemerintah maka pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah dilaksanakan oleh pemerintah yang meliputi :

- a. Koordinasi pemerintah antar susunan pemerintahan.
- b. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan.

- c. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan.
- d. Pendidikan dan pelatihan.
- e. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan.

## **B. Konsep Pemberdayaan Masyarakat**

### **1. Pengertian**

Pemberdayaan Masyarakat yang di maksud adalah sebagai suatu proses kapasitas atau pengembangan kapasitas sumberdaya manusia. dengan kapasitas seseorang akan memiliki kekuatan (daya) atau kelebihan (skill) dalam menjalani kehidupan.

Menurut Sulistiyani dalam (2014:77) secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar daya yang berarti kekuatan dan kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses pembwriaan daya (kekuatan/kemampuan) kepada pihak yang belum berdaya.

Sedangkan menurut Soetomo (2013: 25) masyarakat adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi secara kontinyu, sehingga terdapat relasi sosial yang terpola dan terorganisasi.

Dari kedua defenisi diatas bila digabungkan dapat dipahami makna pemberdayaan masyarakat. Makna pemberdayaan masyarakat menurut Moh. Ali Aziz (2015 :136 ) Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses

kesumber daya, didorong untuk meningkatkan kemandiriannya didalam pengembangan peri kehidupan mereka.

Mengacu pada pengertian dan teori para ahli diatas, ddalam penelitian ini pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya membangkitkan kesadaran akan potensi yaang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkan sehingga masyarakat dapat mencapai kemandirian. Kemudian dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan daya atau kekuatan pada masyarakat dengan cara memberi dorongan, peluang, kesempatan, dan perlindungan dengan tidak mengatur dan mengendalikan kegiatan masyarakat yang diberdayakan untuk mengembangkan potensinya sehingga masyarakat tersebut dapat meningkatkan kemampuan dan mengaktualisasikan diri atau berpartisipasi melalui berbagai aktivitas.

Menurut rumusan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang merupakan usaha masyarakat sendiri yang diintegrasikan dengan otoritas pemerintah guna memperbaiki kondisi sosial ekonomi dan kultural komunitas, mengintegrasikan komunitas kedalam kehidupan nasional dan mendorong kontribusi komunitas yang lebih optimal bagi kemajuan nasional.

Rumusan tersebut berbeda dengan defenisi yang dirumuskan Christenson dan Robinson dalam Hakim yang menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat (*community development*) sebagai suatu proses dimana masyarakat yang tinggal disuatu lokasi tertentu mengembangkan



prakarsa untuk melaksanakan suatu tindakan sosial (dengan atau tanpa intervensi) untuk merubah situasi ekonomi, sosial, kultural, dan atau lingkungan mereka. Defenisi tersebut diartikan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang menggambarkan tindakan bersama warga komunitas atas prakarsa dan partisipasi mereka mengembangkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki dalam rangka meningkatkan kehidupannya.

Perbedaan rumusan atau defenisi tersebut mencerminkan penanganan dalam pembangunan masyarakat yang tidak terlepas dari dua strategi pembangunan yakni strategi pembangunan dari atas kebawah (*top down*) dan strategi pembangunan dari bawah keatas (*bottom up*).

Pada pendekatan pertama, model strategi pembangunan yang didominasi oleh intervensi dari atas kebawah muncul dari dominasi peranan pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan kegiatan pembangunan terkait program program pembangunan kemasyarakatan. Hal ini didasari oleh suatu asumsi bahwa dengan melakukan strategi dari atas kebawah dapat dilakukan control yang tetap. Seperti dinyatakan oleh Bryant dan White dalam Hakim (1982) kelihatan efisien baik dilihat dari energy yang dikeluarkan, dan dalam sejarah pembangunan desa di Indonesia pemerintah juga memegang peranan terpenting dan menggunakan strategi dari atas kebawah.

Pada pendekatan kedua, model strategi pembangunan dari bawah keatas adalah proses perluasan kesempatan bagi individu, kelompok

kelompok sosial dan masyarakat masyarakat yang terorganisasi pada ukuran kecil dan menengah. Pembangunan dari bawah berdasarkan input dan pernyataan kebutuhan lokal dan regional yang ditentukan secara territorial. Strategi pembangunan ini berguna untuk pengembangan masyarakat daerah daerah pinggiran sub nasional terutama sekali daerah pedesaan. Tujuan utamanya adalah pengembangan sepenuhnya sumberdaya alam suatu daerah dan keterampilan sumberdaya manusianya.

Berdasarkan rumusan tersebut nampaknya strategi pembangunan dari bawah keatas (*bottom up*) lebih mencerminkan kaum miskin memperjuangkan nasibnya. Tanpa pemberian kekuasaan kepada masyarakat untuk mengontrol masa depannya, pembangunan dan pengembangan masyarakat tidak akan berhasil.

Sejalan dengan rumusan itu pula, *Shardlow* melihat bahwa pemberdayaan pada intinya membahas individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka.

## **2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat**

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah mengembangkan individu, keluarga, kelompok masyarakat ataupun komunitas dari keadaan atau tidak kurang berdaya menjadi mempunyai daya guna mencapai kehidupan yang lebih baik. Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kondisi atau taraf hidup masyarakat terutama pada lingkungan komunitas

yang bersangkutan. Oleh sebab itu pemberdayaan individu maupun kelompok masyarakat merupakan hal yang harus dilakukan yang bertujuan :

- a. Untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dan keterampilan
- b. Untuk meningkatkan kemampuan berprakarsa secara mandiri agar kehidupan seseorang atau kelompok dimasa datang lebih baik dan lebih sejahtera dari pada kehidupan sekarang
- c. Mengembangkan usaha dan kemampuan dalam pengambilan keputusan

Menurut Sulistiyani (2014:80) tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar maka secara bertahap masyarakat akan memperoleh kemampuan atau dayadari waktu ke waktu.

Masyarakat berdaya adalah masyarakat yang memiliki kekuasaan atau kemampuan kognisi, psikomotorik, dan efektif terhadap urusan sosial (akses terhadap dasar dasar produksi tertentu), politik (kemandirian dalam pengambilan keputusan) dan psikologis untuk membangun kepercayaan diri. Pemberdayaan menenkankan bahwa orang seharusnya memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (*Parsons* dalam Hakim, 2013).

Tujuan lainnya dari suatu proses pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya karena ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil)

### **3. Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan**

Peran pemerintah dalam pemberdayaan Rasyid dalam Muhadam *Labolo* (2013:32,36) adalah mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat. Peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat, maka peran pemerintah yang dimaksud antara lain :

#### **a. Pemerintah sebagai regulator**

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan – peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrument untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan

#### **b. Pemerintah sebagai dinamisator**

Pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala – kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan

secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan. Pembinaan pemulung di tengah masyarakat disamping memberikan dampak positif juga membawa dampak negatif yang perlu pembinaan secara dini. Kehadiran pemulung di tengah – tengah masyarakat kota Makassar memang boleh dikatakan tidak mengganggu ketertiban dan ketentraman umum.

c. Pemerintah sebagai fasilitator

Pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan serta dibidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.

## **C. Konsep Pengelolaan Sampah**

### **1. Pengertian**

- a. Sampah pada dasarnya merupakan suatu bahan yang terbuang atau di buang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia maupun proses-proses alam yang tidak mempunyai nilai ekonomi, bahkan dapat mempunyai nilai ekonomi yang negatif karena dalam penanganannya baik untuk membuang atau membersihkannya memerlukan biaya yang cukup besar.

- b. Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembikinan atau pemakaian barang rusak atau bercacat dalam pembikinan manufktur atau materi berkelebihan atau ditolak atau buangan. Dalam Undang-Undang No.18 tentang Pengelolaan Sampah dinyatakan definisi sampah sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat.
- c. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Sementara itu Radyastuti menyatakan bahwa Sampah adalah sumberdaya yang tidak siap pakai
- d. Sampah adalah sesuatu yang tidak berguna lagi, dibuang oleh pemiliknya atau pemakai semula. Pemerintah bertanggung jawab dalam pengumpulan ulang dan penbuangan sampah dari pemukiman secara memadai. Namun karena terdapat hal lain yang harus diprioritaskan dalam pembangunan di daerah serta kurangnya dana penunjang untuk operasionalisasi pengelolaan persampahan, menjadikan pada beberapa daerah kegiatan pengelolaan sampah ini tidak seperti yang diharapkan.

Hal ini makin diperkuat dengan belum diterapkannya prinsip bahwa yang memproduksi barang harus mengelola sampah dari barang tersebut. Beberapa kondisi umum yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan

sampah perkotaan selama ini, di mana sampah rumah tangga oleh masyarakat dikumpulkan dan dibuang ke sebuah tempat pembuangan atau kontainer yang disediakan oleh pemerintah. Dari sini sampah diangkut oleh truk ke landfill yang umumnya kurang terkontrol, dimana para pemulung mencari barang-barang yang dapat didaur ulang.

Keberadaan sampah dalam jumlah yang banyak jika tidak dikelola secara baik dan benar, maka akan menimbulkan gangguan dan dampak terhadap lingkungan, baik dampak terhadap komponen fisik kimia (kualitas air dan udara), biologi, sosial ekonomi, budaya dan kesehatan lingkungan. Dampak operasional TPA terhadap lingkungan akan memicu terjadinya konflik sosial antar komponen masyarakat. Pada tahap pembuangan akhir/pengolahan, sampah akan mengalami pemrosesan baik secara fisik, kimia maupun biologis sedemikian hingga tuntas penyelesaian seluruh proses

## **2. Jenis dan Sumber Pengelolaan Sampah**

Dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, jenis sampah yang diatur adalah:

### **a. Sampah rumah tangga**

Yaitu sampah yang berbentuk padat yang berasal dari sisa kegiatan sehari-hari di rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik dan dari proses alam yang berasal dari lingkungan rumah tangga. Sampah ini bersumber dari rumah atau dari kompleks perumahan.

b. Sampah sejenis sampah rumah tangga

Yaitu sampah rumah tangga yang bersala bukan dari rumah tangga dan lingkungan rumah tangga melainkan berasal dari sumber lain seperti pasar, pusat perdagangan, kantor, sekolah, rumah sakit, rumah makan, hotel, terminal, pelabuhan, industri, taman kota, dan lainnya.

c. Sampah spesifik

Yaitu sampah rumah tangga atau sampah sejenis rumah tangga yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya memerlukan penanganan khusus, meliputi, sampah yang mengandung B3 (bahan berbahaya dan beracun seperti batere bekas, bekas toner, dan sebagainya), sampah yang mengandung limbah B3 (sampah medis), sampah akibat bencana, puing bongkaran, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, sampah yang timbul secara periode (sampah hasil kerja bakti)

Mekanisme pengelolaan sampah dalam UU N0.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah meliputi, Pengurangan sampah, yaitu kegiatan untuk mengatasi timbulnya sampah sejak dari produsen sampah (rumah tangga, pasar, dan lainnya), mengguna ulang sampah dari sumbernya dan/atau di tempat pengolahan, dan daur ulang sampah di sumbernya dan atau di tempat pengolahan. Pengurangan sampah akan diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri, kegiatan yang termasuk dalam pengurangan sampah ini adalah:

- a. Menetapkan sasaran pengurangan sampah
- b. Mengembangkan Teknologi bersih dan label produk



- c. Menggunakan bahan produksi yang dapat di daur ulang atau diguna ulang
- d. Fasilitas kegiatan guna atau daur ulang
- e. Mengembangkan kesadaran program guna ulang atau daur ulang

Penanganan sampah, yaitu rangkaian kegiatan penanganan sampah yang mencakup pemilahan (pengelompokan dan pemisahan sampah menurut jenis dan sifatnya), pengumpulan (memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau tempat pengolahan sampah terpadu), pengangkutan (kegiatan memindahkan sampah dari sumber, TPS atau tempat pengolahan sampah terpadu, pengolahan hasil akhir (mengubah bentuk, komposisi, karakteristik dan jumlah sampah agar diproses lebih lanjut, dimanfaatkan atau dikembalikan alam dan pemrosesan aktif kegiatan pengolahan sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya agar dapat dikembalikan ke media lingkungan.

### **3. Sistem Pengelolaan Sampah**

Pemerintah Daerah diharapkan dapat melakukan kebijakan politik khususnya mengenai pengelolaan sampah dan hendaknya didukung penuh oleh Pemerintah Pusat dengan melibatkan seluruh *stakeholder* dalam teknis perencanaan, penyelenggaraan dan pengembangannya. Dalam Pengelolaan Sampah Terpadu sebagai salah satu upaya pengelolaan Sampah Perkotaan adalah konsep rencana pengelolaan sampah perlu dibuat dengan tujuan mengembangkan suatu sistem pengelolaan sampah yang modern, dapat diandalkan dan efisien dengan teknologi yang ramah lingkungan. Dalam

sistem tersebut harus dapat melayani seluruh penduduk, meningkatkan standar kesehatan masyarakat dan memberikan peluang bagi masyarakat dan pihak swasta untuk berpartisipasi aktif. Pendekatan yang digunakan dalam konsep rencana pengelolaan sampah ini adalah meningkatkan sistem pengelolaan sampah yang dapat memenuhi tuntutan dalam pengelolaan sampah yang berbasis peran serta masyarakat.

Dalam pengelolaan sampah perkotaan yang ideal, sistem manajemen persampahan yang dikembangkan harus merupakan sistem manajemen yang berbasis pada masyarakat yang di mulai dari pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga. Dalam rencana pengelolaan sampah perlu adanya metode pengolahan sampah yang lebih baik, peningkatan peran serta dari lembaga-lembaga yang terkait dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sampah, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, peningkatan aspek ekonomi yang mencakup upaya meningkatkan retribusi sampah dan mengurangi beban pendanaan serta peningkatan aspek legal dalam pengelolaan sampah

- a. Pemilahan
- b. pengumpulan
- c. pengangkutan
- d. pengolahan
- e. Pemrosesan akhir sampah

#### 4. Aspek Kelompok Pengelolaan Sampah

Menurut Terry (2013) manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen merupakan suatu bentuk kegiatan, atau disebut ”*managing*”, sedangkan pelaksanaannya disebut dengan ”*manager*” atau pengelola. Manajemen juga adalah suatu ilmu pengetahuan maupun seni. Seni adalah suatu pengetahuan bagaimana mencapai hasil yang diinginkan atau dalam kata lain seni adalah kecakapan yang diperoleh dari pengalaman, pengamatan, dan pelajaran serta kemampuan untuk menggunakan pengetahuan manajemen.

Menurut Terry (2013), dalam melakukan pekerjaannya, manajer harus melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, yang dinamakan fungsi-fungsi manajemen. Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Fungsi-fungsi manajemen terdiri dari:

##### a. *Planning*

*Planning* merupakan proses untuk menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut.

b. *Organizing*

Organizing merupakan kegiatan mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut.

c. *Staffing*

Staffing merupakan kegiatan untuk menentukan keperluan-keperluan sumberdaya manusia, pengerahan, penyaringan, latihan dan pengembangan tenaga kerja.

d. *Motivating*

Motivating merupakan kegiatan mengerahkan atau menyalurkan perilaku manusia kearah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan

e. *Controlling*

Controlling merupakan kegiatan mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan, menentukan sebab-sebab penyimpangan-penyimpangan dan mengambil tindakan-tindakan korektif apabila perlu.

Di dalam pelaksanaannya, fungsi manajemen dibedakan menjadi:

a. *Planning*

Berbagai batasan tentang *planning* dari yang sangat sederhana sampai dengan yang sangat rumit. Contoh proses perencanaan yang sederhana adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Menurut Stoner, Planning adalah proses menetapkan sasaran dan tindakan yang perlu mencapai sasaran tadi.

b. *Organizing*

*Organizing* (organisasi) adalah dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam cara yang terstruktur untuk mencapai sasaran spesifik atau sejumlah sasaran.

c. *Leading*

Pekerjaan *leading* meliputi lima kegiatan yaitu:

- 1) Mengambil keputusan
- 2) Mengadakan komunikasi agar ada saling pengertian antara manajer dan bawahan
- 3) Memberi semangat, inspirasi, dan dorongan kepada bawahan supaya mereka bertindak
- 4) Memilih orang-orang yang menjadi anggota kelompoknya, serta memperbaiki pengetahuan dan sikap-sikap bawahan agar mereka terampil dalam usaha mencapai tujuan yang ditetapkan

d. *Directing/Commanding*

*Directing* atau *commanding* adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula.

e. *Motivating*

*Motivating* atau pemotivasian kegiatan merupakan salah satu fungsi manajemen berupa pemberian inspirasi, semangat dan dorongan kepada

bawahan, agar bawahan melakukan kegiatan secara suka rela sesuai apa yang diinginkan oleh atasan.

f. *Coordinating*

*Coordinating* atau pengkoordinasian merupakan salah satu fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, percekocokan, kekosongan kegiatan, dengan jalan menghubungkan, menyatukan dan menyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerja sama yang terarah dalam upaya mencapai tujuan organisasi.

g. *Controlling*

*Controlling* atau pengawasan, sering juga disebut pengendalian adalah salah satu fungsi manajemen berupa penilaian, bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud dengan tujuan yang telah digariskan semula.

h. *Reporting*

*Reporting* adalah salah satu fungsi manajemen berupa penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang bertalian dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi.

i. *Staffing*

*Staffing* merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyusunan personalia pada suatu organisasi sejak dari merekrut tenaga kerja,

pengembangannya sampai dengan usaha agar setiap tenaga memberi daya guna maksimal kepada organisasi.

j. *Forecasting*

*Forecasting* adalah meramalkan, memproyeksikan, atau mengadakan taksiran terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi sebelum suatu rancangan yang lebih pasti dapat dilakukan.

Perencanaan yang berarti bahwa para manajer memikirkan kegiatan-kegiatan mereka sebelum dilaksanakan. Berbagai kegiatan ini biasanya didasarkan pada berbagai metode, rencana atau logika, bukan hanya atas dasar dugaan atau firasat. Pengorganisasian berarti bahwa para manajer mengkoordinasikan sumber-sumber daya manusia dan material organisasi. Kekuatan suatu organisasi terletak pada kemampuannya untuk menyusun berbagai sumberdayanya dalam mencapai tujuan. Semakin terkoordinasi dan semakin terintegrasi kerja organisasi, semakin efektif pencapaian tujuan-tujuan organisasi.

Pengkordinasian merupakan bagian vital pekerjaan manajer. Selanjutnya, pengarahan berarti bahwa para manajer mengarahkan, memimpin dan mempengaruhi para bawahan. Manajer tidak melakukan pekerjaan tersebut dengan sendiri tetapimelakukan menyelesaikan pekerjaan dengan melalui orang lain. Mereka tidak hanya memberi perintah tetapi juga menciptakan iklim yang dapat membantu para bawahan melakukan pekerjaan dengan baik. Pengawasan berarti para manajer berupaya untuk menjamin bahwa organisasi bergerak ke arah tujuannya.

Bila ada beberapa bagian organisasi pada jalur yang salah, maka manajer harus membetulkannya. Menurut Handoko, sebagai pekerja pada orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi: perencanaan, keorganisasian, penyusunan personalia atau kepegawaian, pengarahan dan kepemimpinan dan pengawasan. Hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah selain pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan, termasuk didalamnya adalah penyediaan peralatan yang digunakan, tehnik pelaksanaan pengelolaan dan administrasi. Hal ini bertujuan untuk keberhasilan pelaksanaan pengelolaan sampah (Raharja, 2013).

## **5. Kota Berwawasan Lingkungan**

Kota berwawasan lingkungan adalah satu pendekatan pembangunan kota yang didasarkan atas prinsip-prinsip berwawasan lingkungan/ekologis yang akan menghasilkan satu kota yang mempunyai kualitas lingkungan dan kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan. Kota berwawasan lingkungan/ekologis berarti juga kota yang berkelanjutan, dalam pengertian bahwa masa depan kota diharapkan akan menjadi lebih baik dan lestari. Kota ekologis dengan sendirinya juga merupakan kota yang ramah lingkungan, karena prinsip-prinsip kota ekologis sejalan dengan prinsip konservasi lingkungan. Kota Ekologis diperlukan untuk menjawab tantangan persoalan lingkungan kota yang semakin memburuk dan hal ini disebabkan karena pendekatan pembangunan kota yang berlaku berorientasi



pada aspek ekonomi jangka pendek semata. Kota ekologis sangat krusial bagi Indonesia, karena tingkat urbanisasi dan perkembangan kota yang sangat pesat di Indonesia. Kota berwawasan lingkungan merupakan salah satu jawaban membangun kota yang lebih baik karena secara efisien menggunakan sumber daya kota. Hal ini dapat dilakukan dengan menekan penggunaan sumberdaya, meminimalkan jumlah limbah, mengurangi penggunaan air, udara, tumbuhan, fauna, pantai ataupun danau dengan bangunan, jembatan, dan jaringan sarana prasarana kota.

## **6. Pembedayaan Kelompok Pengelola Sampah**

- a. Pemberdayaan personal, bahwa dalam proses pengelolaan sampah di Kota Makassar ini yaitu dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada setiap personal anggota masyarakat dengan tujuan memberikan pemahaman dan pengetahuan baru.
- b. Pemberdayaan kelompok kecil, bahwa pemberdayaan ditujukan kepada ibu-ibu PKK serta Karang Taruna oleh komunitas ataupun juga dari pemerintah setempat.
- c. Pengorganisasian masyarakat, bahwa masyarakat berperan utama dalam pelaksanaan pengelolaan sampah ini. Hal ini pula terkait dengan program pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah setempat.
- d. Kemitraan, bahwa kemitraan ini dilakukan dengan mencari jaringan seperti CSR perusahaan-perusahaan juga dengan kementerian yang terkait dengan bidang pengelolaan sampah.

- e. Aksi sosial dan politik, bahwa dengan menjalankan proses pengelolaan sampah dimulai dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi secara bersama dengan mengandalkan sumber daya manusiasetempat

#### **D. Kerangka Pikir**

Pada bagian kerangka pikir dalam penelitian ini sebagai pemerintah Kota Makassar dalam mengelola sampah harus dilandasi tiga aspek yaitu : 1) Peran pemerintah sebagai fasilitator yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan serta dibidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan. 2) Peran pemerintah sebagai dinamisator yaitu menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala – kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan. 3) Peran pemerintah sebagai regulator yaitu menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrument untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan. dan sejalan dengan hal itu, dibutuhkan kelompok masyarakat pengelola sampah

dengan cara melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Hal tersebut yang akan menjadi kajian utama ketiga hal dalam penelitian ini agar masyarakat dapat membantu mengelola sampah mulai dari pemilihan sampai ke pemrosesan akhir. Skema kerangka pikir dapat terlihat dalam kerangka pikir berikut :

### **Bagan Kerangka Pikir**



#### **E. Fokus Penelitian**

Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam proposal ini adalah peran pemerintah dalam pemberdayaan kelompok masyarakat pengelolaan sampah di kota makassar.

#### **F. Deskripsi Fokus Penelitian**

Berdasarkan skema kerangka pikir diatas maka dapat kita kemukakan defenisi fokus sebagai berikut:

1. Peran pemerintah yaitu perilaku yang diharapkan dari pemerintah dalam suatu kegiatan guna untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

2. Peran pemerintah sebagai fasilitator yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah
3. Peran pemerintah sebagai dinamisator yaitu menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala – kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah
4. Peran pemerintah sebagai regulator yaitu menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Kebersihan, Bank Sampah Pusat, Bank Sampah Unit (Tempat Pengelolaan Sampah). Waktu penelitian ini dilakukan selama dua bulan

#### **B. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif memiliki beberapa perspektif teori yang didukung penganalisaan yang lebih mendalam terhadap gejala yang terjadi, dikarenakan kajiannya adalah fenomena masyarakat yang selalu mengalami perubahan (dinamis), yang sulit diukur dengan menggunakan angka-angka maka penelitian ini membutuhkan analisis yang lebih mendalam dari sekedar penelitian kuantitatif yang sangat bergantung pada kuantifikasi data. Penelitian ini mencoba memahami apa yang dipikirkan oleh masyarakat terhadap suatu fenomena.

#### **C. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer, diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung dari pihak-pihak yang bersangkutan dengan masalah yang akan diteliti dalam hal ini adalah staf bidang kebersihan. Untuk memperoleh sumber data primer digunakan observasi, dan wawancara.

2. Data sekunder, adalah data yang dikumpulkan peneliti yang sumbernya dari data-data yang sudah diolah sebelumnya menjadi seperangkat informasi dalam bentuk dokumen, laporan-laporan, dan informasi tertulis lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian. Sesuai dengan tujuan dan rumusan masalah maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara yaitu pengambilan data dengan cara menyatakan sesuatu kepada seseorang *responden*, caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka. Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Pada penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara kepada masyarakat pemulung yang secara langsung akan merasakan bagaimana upaya pemberdayaan masyarakat yang di programkan oleh pemerintah serta beberapa pejabat/staf petugas kebersihan kota Makassar.

2. Observasi

Di samping wawancara, penelitian ini juga melakukan metode observasi. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian. Dalam penelitian ini observasi dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat

dipahami dalam konteksnya. Observasi yang akan dilakukan adalah observasi terhadap subjek, perilaku subjek selama wawancara, interaksi subjek dengan penelitian dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara, dalam melakukan observasi, penulis menggunakan pedoman observasi sebagai instrument pengamat. Jenis *field research* yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dimana penulis terjun langsung mendatangi informan.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Data yang dikumpulkan menggunakan pengumpulan data dokumentasi cenderung bersifat data sekunder. Misalnya, foto, video dan arsip. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dengan cara meneliti dokumen yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti.

### E. Informan

Mengetahui penelitian bersifat kualitatif maka yang menjadi informan penulis adalah 6 orang masyarakat yang mengelola sampah khususnya yang berada di kota Makassar.

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Kepala UPTD Pengelola Sampah	1 Orang
2.	Direktur Bank Sampah Toddopuli	1 Orang
3.	Pengangkut Sampah	2 Orang
3.	Masyarakat	2 Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>6 Orang</b>

## **F. Teknik Analisis Data**

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan:

### *1. Data Reduction (Reduksi Data)*

Data yang diperoleh dilapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan makin lama peneliti dilapangan, maka jumlah data akan makin banyak dan kompleks. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal – hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu

### *2. Data Display (Penyajian Data)*

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

### *3. Conclusion Drawing/Verification (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi)*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila data kesimpulan data yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.



## **G. Keabsahan Data**

Triangulasi bermakna yakni mengadakan pengecekan akan kebenaran data yang akan dikumpulkan dari berbagai sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain, serta pengecekan pada waktu yang berbeda.

### **1. Triangulasi Sumber**

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek pada sumber lain keabsahan data yang telah diperoleh sebelumnya

### **2. Triangulasi Metode**

Triangulasi metode bermakna data yang diperoleh dari satu sumber dengan menggunakan metode atau teknik tertentu diuji kekuatan atau ketidak akuratannya

### **3. Triangulasi Waktu**

Triangulasi waktu berkenaan dengan waktu pengumpulan data.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Objek Penelitian**

Profil UPTD Bank Sampah Toddopuli Makassar merupakan salah satu Unit Pelayanan Bank Sampah yang ada di Wilayah Kota Makassar.

##### **1. Standar Pelayanan**

Standar pelayanan UPTD. Pengelolaan Daur Ulang Sampah sebagai berikut :

###### **a. Tahap persiapan pengurus Bank Sampah Unit**

- 1) Mempersiapkan produk yang sudah dikepak dan dipilah sesuai dengan jenisnya.
- 2) Memberi tanda/kode pada karung pilah masing-masing BSU
- 3) Memastikan setiap produk sudah dalam keadaan siap ditimbang oleh petugas UPTD. Pengelolaan Daur Ulang Sampah dengan terlebih dahulu telah melakukan penimbangan awal oleh BSU dan mengkalkulasi jumlah transaksinya.
- 4) Bersama-sama dengan Petugas dari UPTD. Pengelolaan Daur Ulang Sampah melakukan penimbangan dan pencatatan bersama.
- 5) Mendokumentasikan proses penimbangan dan transaksi sebagai bahan laporan
- 6) Pengurus BSU wajib menyimpan bukti transaksi penimbangan sebagai bukti klaim pada UPTD. Pengelolaan Daur Ulang Sampah.

- 7) Pengurus BSU wajib mencatat dan membukukan semua bukti transaksi dan penimbangan dengan baik.
- b. Tahap pemberian pelayanan oleh petugas UPTD. Pengelolaan Daur Ulang Sampah
- 1) Menyiapkan timbangan dan pencatatan transaksi dan penimbangan
  - 2) Memanfaatkan ruang seefisien mungkin dalam menyusun dan mengangkut produk.
  - 3) Memastikan semua produk yang diangkut telah terpilah dengan rapi dan telah ditimbang dengan benar.
  - 4) Bersama-sama dengan petugas dari BSU menyaksikan proses penimbangan, penghitungan dan pencatatan pada slip transaksi.
  - 5) Memastikan barang/produk sudah tersusun rapi dan kuat diatas alat angkut dan memastikan tidak ada potensi yang dapat mengganggu kelancaran pengangkutan dalam perjalanan Sebelum meninggalkan lokasi penimbangan.
  - 6) Setibanya di UPTD. Pengelolaan Daur Ulang Sampah, selanjutnya produk diletakkan dalam keranjang pengamatan untuk selanjutnya ditimbang ulang oleh petugas Penimbangan dan Pencatatan dari UPTD. Pengelolaan Daur Ulang Sampah.
2. Teknis Transaksi
- a. Penjemputan produk dari BSU mengikuti jadwal yang telah disusun oleh UPTD. Pengelolaan Daur Ulang Sampah.

- b. Untuk memperoleh konfirmasi kepastian penjemputan, maka 1 sampai 2 jam sebelumnya menghubungi Petugas UPTD. Pengelolaan Daur Ulang Sampah dalam bentuk SMS/CALL untuk kepastian penjemputan.
- c. Setiap transaksi wajib menggunakan

**Tabel 4.1**  
**Kelompok Pengelola Sampah Kelurahan dan Kecamatan**

NO	Kecamatan	Nama Bank Sampah Unit	
		Nama	Kelurahan
1	RAPPOCINI	PELITA HARAPAN	BALLAPARANG
2	RAPPOCINI	DURIAN	KASSI-KASSI
3	RAPPOCINI	PELITA BANGSA	BALLAPARANG
4	RAPPOCINI	BERSATU	MAPPALA
5	RAPPOCINI	DAHLIA 2	BALLAPARANG
6	RAPPOCINI	BERSATU	BONTOMAKKIO
7	RAPPOCINI	MAPPALA 1	MAPPALA
8	RAPPOCINI	MINASA UPA	GUNUNG SARI
9	RAPPOCINI	JIPANG 04	KARUNGRUNG
10	RAPPOCINI	GOTONG ROYONG	BALLAPARANG
11	RAPPOCINI	KANAL MANDIRI	RAPPOCINI
12	RAPPOCINI	BIMLI	BUAKANA
13	RAPPOCINI	BUNGA TONJONG	MAPPALA
14	RAPPOCINI	GLATIK	BALLAPARANG
15	RAPPOCINI	AGANG TA'	RAPPOCINI
16	RAPPOCINI	KARYA 2	KARUNRUNG
17	RAPPOCINI	SEJAHTERA	BALLAPARANG
18	RAPPOCINI	SAPPO'E	RAPPOCINI
19	RAPPOCINI	SOMBERE	BANTA BANTAENG
20	RAPPOCINI	GOTONG JAYA	BUAKANA
21	RAPPOCINI	REZKY BERSATU	MAPPALA
22	RAPPOCINI	SALEMBA	GUNUNG SARI
23	RAPPOCINI	KATANGKA	GUNUNG SARI
24	RAPPOCINI	TALASALAPANG	GUNUNG SARI
25	RAPPOCINI	LONGGAR	KASSI-KASSI
26	RAPPOCINI	RESKI BERSATU	MAPPALA
27	RAPPOCINI	RAPPUNG RONG	BANTA-BANTAENG
28	RAPPOCINI	BONTO DG. NGIRATE	BONTO MAKKIO

29	RAPPOCINI	BERKAH	BONTO MAKKIO
30	RAPPOCINI	KARYA KARANG TARUNA	BONTO MAKKIO
31	RAPPOCINI	SIPAKAINGA	KASSI-KASSI
32	RAPPOCINI	GOTONG JAYA	BUAKANA
33	RAPPOCINI	TANGKASA	RAPPOCINI
34	RAPPOCINI	YAYASAN AISYIYAH	RAPPOCINI
35	RAPPOCINI	KENCANA	MAPPALA
36	RAPPOCINI	PASSAMATURUKANG	BANTA-BANTAENG
37	TALLO	RESTU BUMI	KALUKUANG
38	TALLO	SEHATI	UJUNG PANDANG
39	TALLO	LALATANG	LALATANG
40	TALLO	TUNAS HARAPAN	PANNAMPU
41	TALLO	CAHAYA SUWANGGA	SUWANGGA
42	TALLO	MUTIARA	RAPPOKALLING
43	TALLO	STAR	LALATANG
44	TALLO	SUWANGGA 4	SUWANGGA
45	TALLO	RAKYAT TALLO	TALLO
46	TALLO	BERLIAN	RAPPOKALLING
47	TALLO	PERMATA BUNDA	RAPPOKALLING
48	TALLO	PERMATA	KALUKU BODOA
49	TALLO	MARBO BAHARI	TALLO
50	TALLO	LESTARI	TALLO
51	TALLO	SIPURENNU	LEMBO
52	TALLO	BERSINAR	RAPPOKALLING
53	TALLO	RAJATA	TALLO
54	TALLO	REMPONG	TALLO
55	TALLO	SIPAKAINGA	RAPPOJAWA
56	TALLO	ASRI	RAPPOJAWA
57	TALLO	SIPAKALEBBIRI	LEMBO
58	TALLO	SIKATUTUI	LEMBO
59	TALLO	KEBUN RAYA	PANNAMPU
60	TALLO	MATANGKASA	LAKKANG
61	TALLO	BEROANGING	PANNAMPU
62	TALLO	GAMBUS	KALUKU BODOA
63	TALLO	HARAPAN	RAPPOJAWA
64	TALLO	AR DG. NGUNJUNG	RAPPOKALLING
65	TALLO	SIPAKATAU	TAMMUA
66	TALLO	SIPAKALEBBI	TAMMUA
67	TALLO	ASRI	RAPPOJAWA
68	TALLO	GAMBUS	KALUKU BODOA
69	TALLO	HARAPAN	RAPPOJAWA

70	TALLO	BS. SEKTORAL	
71	TALLO	ARIF ILHAM	TAMMUA
72	TALLO	MAWAR	BULOA
73	TALLO	JULUATIA	BULOA
74	PANAKUKANG	MANDIRI	TAMAMAUNG
75	PANAKUKANG	TERATAI	PANAUKANG
76	PANAKUKANG	ADIPURA	KARUWISI UTARA
77	PANAKUKANG	TELLO CERIA	TELLO BARU
78	PANAKUKANG	CITRA ABADI	KARUWISI
79	PANAKUKANG	BAMPASKER	BATUA
80	PANAKUKANG	MATAHARI	TAMAMAUNG
81	PANAKUKANG	BORONG RAYA BARU	BATUA
82	PANAKUKANG	MATAHARI	TAMAMAUNG
83	PANAKUKANG	BONTO LABUA	KARUWISI UTARA
84	PANAKUKANG	BATUA RAYA 7	BATUA
85	PANAKUKANG	SWADAYA BUNDA	MASALE
86	PANAKUKANG	TERATAI	KARUWISI UTARA
87	PANAKUKANG	SINRIJALA	KARAMPUANG
88	PANAKUKANG	BERKAH	KARAMPUANG
89	PANAKUKANG	SEJAHTERA	KARAMPUANG
90	PANAKUKANG	RACING SINRIJALA	KARAMPUANG
91	PANAKUKANG	BERKAH	KARAMPUANG
92	PANAKUKANG	SEJAHTERA	KARAMPUANG
93	PANAKUKANG	SIPAKATALLASA	KARUWISI
94	PANAKUKANG	BATARA	BATUA
95	PANAKUKANG	SEJAHTERA ABADI	BATUA
96	PANAKUKANG	SINDIR	TAMAMAUNG
97	PANAKUKANG	CV. DEWI 2	PANDANG
98	PANAKUKANG	JINGGA	TAMAMAUNG
99	PANAKUKANG	BLOK M	PAMPANG
100	PANAKUKANG	TERATAI	PAMPANG
101	PANAKUKANG	PAMPANG 3	PAMPANG
102	PANAKUKANG	RW. 4	PAMPANG
103	PANAKUKANG	ASWIP 2	PAMPANG
104	TAMALATE	PABAENG-BAENG 5	PABAENGBAENG
105	TAMALATE	ASOKA 6	BONGAYA
106	TAMALATE	ASOKA 4	BONGAYA
107	TAMALATE	KUMALA	JONGAYA
108	TAMALATE	TANJUNG BAYANG	TANJUNG
109	TAMALATE	TITIAN SEJAHTERA	BONGAYA
110	TAMALATE	BERSATU	PABAENGBAENG

111	TAMALATE	BERDIKARI	BAROMBONG
112	TAMALATE	PEDULI NEGERI	MANGASA
113	TAMALATE	DANAU BIRU	BAROMBONG
114	TAMALATE	JE'NEBERANG	MACCINI SOMBALA
115	TAMALATE	PEDULI LINGKUNGAN	PARANG TAMBUNG
116	TAMALATE	SURYA ABADI	BONGAYA
117	TAMALATE	BALANG BARU	BALANG BARU
118	TAMALATE	RAVISHA AR-RAHMAN	MANGASA
119	TAMALATE	MANURUKKI	MANGASA
120	TAMALATE	MALENGKERI	MANGASA
121	TAMALATE	MAMOA	MANGASA
122	TAMALATE	ASOKA II	JONGAYA
123	TAMALATE	MAKMUR	MACCINI SOMBALA
124	TAMALATE	KAMPIS	MACCINI SOMBALA
125	TAMALATE	MABESSA	MANGASA
126	TAMALATE	MACCINNONG	PARANG TAMBUNG
127	TAMALATE	MACCIS	MACCINI SOMBALA
128	TAMALATE	GOTONG	PABAENGBAENG
129	TAMALATE	ASOKA	MANGASA
130	TAMALATE	PARAKATTE RONG	MACCINI SOMBALA
131	TAMALATE	KPRM BONTODURI	PARANG TAMBUNG
132	MANGGALA	MEKAR SWADAYA	BANGKALA
133	MANGGALA	LISANA	MANGGALA
134	MANGGALA	LORSA	ANTANG
135	MANGGALA	PEDULI LINGKUNGAN	BANGKALA
136	MANGGALA	BINA KASIH	MANGGALA
137	MANGGALA	SIKAMASEANG	BANGKALA
138	MANGGALA	BIRO DALAM 10	MANGGALA
139	MANGGALA	ASINDO	ANTANG
140	MANGGALA	PUTRA KEMBAR	MANGGALA
141	MANGGALA	BATU KEBO	MANGGALA
142	MANGGALA	SEJATI	MANGGALA
143	MANGGALA	SEJAHTERA ABADI	BATUA
144	MANGGALA	BORONG RAYA MANDIRI	BATUA
145	UJUNG TANAH	SEJAHTERA	TABARINGAN
146	UJUNG TANAH	SAMATURU	BARRANG LOMPO
147	UJUNG TANAH	HOKI 1	TAMALABBA
148	UJUNG TANAH	TAWAKKAL	CAMBA BERUA
149	UJUNG TANAH	PATTINGALLOANG 4	PATTINGALLOANG
150	UJUNG TANAH	BERSINAR	TAMALABBA
151	UJUNG TANAH	PASANG SURUT	CAMBAYA

152	UJUNG TANAH	MAWAR	CAMBA BERUA
153	UJUNG TANAH	MATA ALLO	TOTAKA
154	UJUNG TANAH	PESISIR	CAMBAYYA
155	UJUNG TANAH	KPRM LORONG TA	CAMBAYYA
156	MAMAJANG	BAJI PAMAI	TAMPARANG KEKE
157	MAMAJANG	SEMANGAT I	MAMAJANG
158	MAMAJANG	SEMANGAT 3	MAMAJANG LUAR
159	MAMAJANG	SIPAKATAU	KARANGANYAR
160	MAMAJANG	MARIBAR 03	MARICAYA BARU
161	MAMAJANG	SEMANGAT 2	BONTO LEBANG
162	MAMAJANG	KENANGA	MARICAYA
163	MAMAJANG	BADAK	BONTO BIRAENG
164	MAMAJANG	MASAGENA	MARICAYA
165	MAMAJANG	SIPAKAINGA	MANDALA
166	MAMAJANG	BAJI PAMAI	TAMPARANG KEKE
167	MAMAJANG	BAJI PANGASSENG	TAMPARANG KEKE
168	MAMAJANG	SAMBUNG JAWA BERSERI	SAMBUNG JAWA
169	MAMAJANG	SAWALA	MAPPAKASUNGGU
170	MAMAJANG	SIRANNUANG	MAPPAKASUNGGU
171	MAMAJANG	SIPAKABAJI	LABUANG BAJI
172	MAMAJANG	KANCIL	BONTO BIRAENG
173	BIRINGKANAYA	PERTAMINA	SUDIANG
174	BIRINGKANAYA	CAHAYA BAHARI	UNTIA
175	BIRINGKANAYA	CUMULLUS	SUDIANG
176	BIRINGKANAYA	SUDIRA	SUDIANG RAYA
177	BIRINGKANAYA	MUTIARA ASRI	BULUROKENG
178	BIRINGKANAYA	RAHMAT	SUDIANG RAYA
179	BIRINGKANAYA	INDAH BERSERI	BULUROKENG
180	BIRINGKANAYA	MUTIARA JELITA	BULUROKENG
181	BIRINGKANAYA	GELORA	SUDIANG RAYA
182	BIRINGKANAYA	CITRA DAYA	SUDIANG RAYA
183	BIRINGKANAYA	BERKAH	SUDIANG RAYA
184	BIRINGKANAYA	INDAH	PACCERAKKANG
185	BIRINGKANAYA	SAKINAH	PACCERAKKANG
186	BIRINGKANAYA	MITRA BERSAMA	PACCERAKKANG
187	BIRINGKANAYA	SIPAKATAU	KAPASA
188	BIRINGKANAYA	TURUNGANG SEKO	TAMALANREA
189	BIRINGKANAYA	MATAHARI	TAMALANREA
190	BIRINGKANAYA	ANAK LORONG	TAMALANREA
191	BIRINGKANAYA	AL-FITRAH	PACCERAKKANG
192	BIRINGKANAYA	SIKAMASEANG	PACCERAKKANG



193	BIRINGKANAYA	P3 E SUMA	SUDIANG
194	BIRINGKANAYA	PERMATA	SUDIANG
195	BIRINGKANAYA	SEKTORAL	SUDIANG
196	BIRINGKANAYA	MUTIARA BERSINAR	BULUROKENG
197	MAKASSAR	MELATI	BARANA
198	MAKASSAR	SUKSES MULIA	BARA-BARAYA
199	MAKASSAR	MARADEKAYA	MARADEKAYA
200	MAKASSAR	ASBAR CERIA	BARA-BARAYA
201	MAKASSAR	BARTIM	BARA-BARAYA
202	MAKASSAR	BERKAH	MARADEKAYA
203	MAKASSAR	SOMBERE	MARICAYA
204	MAKASSAR	MARADEKAYA	MARADEKAYA
205	MAKASSAR	SIPAKATAU	MACCINI GUSUNG
206	MAKASSAR	BATARA BERSIH	BARA BARAYA
207	MAKASSAR	BATARA SEJAHTERA	BARA BARAYA
208	MAKASSAR	PERMATA	MACCINI PARANG
209	MAKASSAR	BATARA SEHAT	BARA BARAYA
210	MAKASSAR	TULIF	BARANA
211	MAKASSAR	SUKSES ABADI	BARA BARAYA
212	MAKASSAR	FLAMBOYAN	MACCINI
213	MAKASSAR	SIPAKALABBIRI	MACCINI GUSUNG
214	MAKASSAR	SIKATUTUI	MACCINI GUSUNG
215	MAKASSAR	TERATAI	MACCINI
216	MAKASSAR	BERKAH	MACCINI PARANG
217	MAKASSAR	BERSINAR	MACCINI PARANG
218	MAKASSAR	KANAL	MARADEKAYA
219	MAKASSAR	SIPAKAINGA	MACCINI GUSUNG
220	MAKASSAR	SUKSES BERSAMA	BARA BARAYA
221	MAKASSAR	SALAHUTU	MARADEKAYA
222	MAKASSAR	MARSELA	MARADEKAYA
223	MAKASSAR	PAOTERE	GUSUNG
224	MAKASSAR	PHINISI	GUSUNG
225	MAKASSAR	SUKSES MANDIRI	BARA BARAYA
226	MAKASSAR	MABELLO	LARIANGBANGI
227	MAKASSAR	MELATI	BARANA
228	MAKASSAR	BATARA SEHAT	BARA-BARAYA
229	MAKASSAR	PALEM	MACCINI
230	MAKASSAR	MARSELA 1	MARDEKAYA
231	MAKASSAR	BERKAH MACCINI	MACCINI
232	MAKASSAR	JALAHONG	BARA-BARAYA
233	TAMALANREA	BIRA 2	BIRA

234	TAMALANREA	TUNAS MEKAR	TAMALANREA
235	TAMALANREA	COKRO INDAH	TAMALANREA
236	TAMALANREA	BERLIAN 09	TAMALANREA
237	TAMALANREA	TANGKASA	TAMALANREA
238	TAMALANREA	MELATI	TAMALANREA
239	TAMALANREA	DAMAI	TAMALANREA
240	TAMALANREA	LINGKUNGAN KAPASA	KAPASA
241	TAMALANREA	KANTISANG	TAMALANREA
242	TAMALANREA	PADA ELO	TAMALANREA
243	TAMALANREA	KAMPUNG PARANG	TAMALANREA
244	TAMALANREA	SEHATI	PARANGLOE
245	TAMALANREA	BERKAH	KAPASA
246	BONTOALA	LIBARA	BARAYA
247	BONTOALA	MELATI III	BARAYA
248	BONTOALA	MALA'BIRI 1	BONTOALA
249	BONTOALA	MANDIRI SEJAHTERA	GADDONG
250	BONTOALA	CEMPAKA	BONTOALA
251	BONTOALA	MALA'BIRI 2	BONTOALA
252	BONTOALA	UMEGA	LAYANG
253	BONTOALA	MAWAR	MALIMONGAN
254	BONTOALA	BERKAH	MALIMONGAN
255	BONTOALA	SEJAHTERA	MALIMONGAN
256	BONTOALA	PURNAMA	MALIMONGAN
257	BONTOALA	KARYA BERSAMA	GADDONG
258	BONTOALA	TRI NUR	GADDONG
259	BONTOALA	LAYANG SEHATI	LAYANG
260	BONTOALA	SEJAHTERA BERSAMA	GADDONG
261	BONTOALA	SEKTORAL	GADDONG
262	BONTOALA	BERKAH	TIMUNGAN
263	BONTOALA	SIKAMASEANG	BARAYA
264	WAJO	MAMPU 1	MAMPU
265	WAJO	REZKI	ENDE
266	WAJO	MELATI 4	MELAYU BARU
267	WAJO	PARAIKATTE	MAMPU
268	WAJO	MANDIRI	MALIMONGAN TUA
269	WAJO	MELATI 1	MELAYU BARU
270	WAJO	BS. SEKTORAL	MELAYU BARU
271	WAJO	MELATI 3	MELAYU BARU
272	MARISO	KERAKU MARGA 04	KUNJUNG MAE
273	MARISO	SYATAS'S	LETTE
274	MARISO	NURI INDAH	MARISO

275	MARISO	SIPAKABAJI	MATTOANGING
276	MARISO	CENDRA KARYA	KUNJUNG MAE
277	MARISO	TORIOLO	TAMARUNANG
278	MARISO	RAJAWALI	PANAMBUNGAN
279	MARISO	MARISO	MARISO
280	MARISO	SEHATI	KAMPUNG BUYANG
281	MARISO	APPASULAPA	KAMPUNG BUYANG
282	MARISO	KOKOLOJIA	KUNJUNG MAE
283	MARISO	HOLLYWOOD	BONTORANNU
284	MARISO	REZEKY/RAHMATULLAH	BONTORANNU
285	MARISO	MAMPACCING	LETTE
286	MARISO	MAPPANYUKKI	MARIO
287	MARISO	BANGAU	MARIO
288	MARISO	RAHMATULLAH	BONTORANNU
289	MARISO	PEDULI LINGKUNGAN	MATTOANGING
290	MARISO	AISYAH BAJI DAKKA	MARISO
291	UJUNG PANDANG	MATAHARI	BULOGADING
292	UJUNG PANDANG	APPAKABAJI	MALOKU
293	UJUNG PANDANG	ANGGREK	LAJANGIRU
294	UJUNG PANDANG	INTANG	LAE-LAE
295	UJUNG PANDANG	PISSEL	PISANG SELATAN
296	UJUNG PANDANG	GEMA LIMBARS	LAJANGIRU
297	UJUNG PANDANG	MALOKU	MALOKU
298	UJUNG PANDANG	SALSABILA	LAJANGIRU
299	UJUNG PANDANG	APPAKABAJI II	MALOKU
300	UJUNG PANDANG	COSPAR	LAJANGIRU
301	UJUNG PANDANG	LOSARI	LOSARI
302	UJUNG PANDANG	SEJAHTERA	SAWERIGADING
303	UJUNG PANDANG	SD GOTONG-GOTONG	PISANG SELATAN
304	UJUNG PANDANG	PISSEL REGINA	PISANG SELATAN
305	UJUNG PANDANG	AUDY	PISANG SELATAN
306	UJUNG PANDANG	LORSET	MALOKU
307	UJUNG PANDANG	KEL. BARU	BARU
308	UJUNG PANDANG	LOMBAT	PISANG UTARA
309	UJUNG PANDANG	CENDRANA	LAJANGIRU
310	UJUNG PANDANG	SEHATI	LAJANGIRU
311	UJUNG PANDANG	BERSAMA 01	BARU
312	UJUNG PANDANG	BERSAMA 02	BARU
313	UJUNG PANDANG	BERSAMA 03	BARU
314	UJUNG PANDANG	ANGGREK 2	PISANG UTARA
315	UJUNG PANDANG	AKBAR	PISANG SELATAN

## **B. Hasil Penelitian**

Penelitian mengenai Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengelolaan Sampah di Kota Makassar. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam. Adapun informan yang berhasil diwawancarai sebanyak 6 orang.

### **1. Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah**

*“....., Iya, menurut saya masih perlu ditingkatkan karena masih banyak sampah yang berserakan di lingkungan kita tapi kami sebagai yang mewakili pemerintah kota Makassar akan lebih meningkatkan lagi kinerjanya dalam mengelola sampah .....”* (Nas, Kepala UPTD Pengelola Sampah, Wawancara 28 Juli 2018).

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tanggap informan tentang peran pemerintah dalam pemberdayaan kelompok masyarakat pengelolaan sampah. Hal ini sama dengan teori dimana salah satu masyarakat yang harus diberdayakan adalah masyarakat pemulung, karena sumber daya manusia pemulung dalam upaya peningkatan kualitas baik manusia sebagai insan maupun sebagai sumber daya pembangunan terasa semakin penting.

*“....., menurut saya, pemberdayaan kelompok sampah masih perlu dibenahi karena saat ini masih banyak masyarakat yang tidak terlalu memahami bahwa betapa pentingnya kelompok masyarakat dalam hal pengelolaan sampah .....”* (ERN, Direktur Bank Sampah, Wawancara 28 Juli 2018).

Melihat kondisi di lapangan, kiranya perlu terobosan strategi dan langkah inovatif dalam melindungi dan memberdayakan pemulung, agar pemulung tidak selalu menjadi korban. Perencanaan matang harus berbasis daya dukung sumber daya alam dan lingkungan.

”....., menurutku, apa yang selama ini dicita – citakan oleh bapak walikota belum sepenuhnya baik terutama dalam mengelola sampah” (SUL, Pengangkut Sampah, Wawancara 29 Juli 2018)

Sedangkan pemerintah menurut *Finer* dalam Muhadam (2011:14) setidaknya menunjukkan empat pengertian pokok yaitu pertama pemerintah merujuk pada suatu proses pemerintahan, dimana kekuasaan dioperasionalkan oleh mereka yang memegang kekuasaan secara sah.

”....., menurut saya, penting itu untuk membentuk kelompok masyarakat pengelolaan sampah supaya lingkungan bersih dan sejuk” (SAM, Pengangkut Sampah, Wawancara 29 Juli 2018)

Semua proses yang berlangsung dalam bingkai pengelolaan kekuasaan dipandang merupakan aktivitas yang menunjukkan pada performa pemerintah. Realitas ini dapat dilihat ketika seseorang menyadari bahwa semua aktivitas keteraturan dan ketertiban hingga urusan yang berbelit-belit dalam birokrasi merupakan mekanisme yang didesain secara sengaja oleh pemerintah.

“....., kalo saya merasa bahwa peran pemerintah saat ini sudah cukup baik, namun perlu ditingkatkan” (IRN, Masyarakat, Wawancara 29 Juli 2018).

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Regulai dalam pengelolaan sampah kota yaitu menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi, menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah, melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain.

*“.....,menurutku, peran pemerintah sebenarnya bagusmi, tapi begitumi, kadang – kadang ditingkatkan kadang juga dibiarkan begitu saja, tapi mudah – mudahan pemerintah dalam hal ini walikota Makassar agar senantiasa memberikan peranan penting dalam pengelolaan sampah” (BAS, Masyarakat, Wawancara 29 Juli 2018).*

Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

## **2. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator**

*“....., sejauh ini banyak faktor yang mendukung dalam mengelola sampah diantaranya disediakan sarana pembuangan sampah gendang dua, walaupun kurang efektif, tapi setidaknya bisa membantu masyarakat dalam mengelola sampah (Nas, Kepala UPTD Pengelola Sampah, Wawancara 28 Juli 2018).*

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa keberadaan sampah dalam jumlah yang banyak jika tidak dikelola secara baik dan benar, maka akan menimbulkan gangguan dan dampak terhadap lingkungan, baik dampak terhadap komponen fisik kimia (kualitas air dan udara), biologi, sosial ekonomi, budaya dan kesehatan lingkungan.

*“....., saya sebagai masyarakat tentunya sangat setuju karena dengan adanya kelompok masyarakat dalam mengelola sampah maka lingkungan sekitar kita akan menjadi bersih” (ERN, Direktur Bank Sampah, Wawancara 28 Juli 2018).*

Semua proses yang berlangsung dalam bingkai pengelolaan kekuasaan dipandang merupakan aktivitas yang menunjukkan pada

performa pemerintah. Realitas ini dapat dilihat ketika seseorang menyadari bahwa semua aktivitas keteraturan dan ketertiban hingga urusan yang berbelit-belit dalam birokrasi merupakan mekanisme yang didesain secara sengaja oleh pemerintah.

*“....., menurut saya yang paling mendasar faktor pendukung dalam mengelola sampah adalah bank sampah pusat maupun unit, karena selama ini bank sampah sudah bekerja maksimal dalam mengelola sampah dengan baik (SUL, Pengangkut Sampah, Wawancara 29 Juli 2018)*

Dampak operasional TPA terhadap lingkungan akan memicu terjadinya konflik sosial antar komponen masyarakat. Pada tahap pembuangan akhir/pengolahan, sampah akan mengalami pemrosesan baik secara fisik, kimia maupun biologis sedemikian hingga tuntas penyelesaian seluruh proses

*“....., bank sampah salah satu pendukung masyarakat dalam mengelola sampahnya sendiri” (SAM, Pengangkut Sampah, Wawancara 29 Juli 2018)*

Pengelolaan sampah yang tidak berbahaya dari pemukiman dan institusi di area metropolitan biasanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sedangkan untuk sampah dari area komersial dan industri biasanya ditangani oleh perusahaan pengolah sampah

*“....., Iye, peran pemerintah sebenarnya sangat penting tapi kesadaran masyarakat juga harus ditingkatkan demi Makassar tidak rantasa’ sesuai dengan apa yang selama ini dikatakan oleh bapak walikota” (IRN, Masyarakat, Wawancara 29 Juli 2018).*

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan daur ulang atau pembuangan dari material sampah. Kalimat ini biasanya mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia, dan

biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, atau estetika.

*“....., Menurut saya, peran pemerintah sudah bagusmi, sisa diperbaiki mami apa yang masih kurang.....”* (BAS, Masyarakat, Wawancara 29 Juli 2018)

Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam (*resources recovery*). Pengelolaan sampah bisa melibatkan zat padat, cair, gas, atau radioaktif dengan metode dan keterampilan khusus untuk masing-masing jenis zat

### 3. Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator

*“....., menurut saya, faktor penghambat yang paling mendasar adalah kerja sama antara petugas kebersihan dan masyarakat yang belum berjalan dengan baik”* (Nas, Kepala UPTD Pengelola Sampah, Wawancara 28 Juli 2018)

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Dalam Pengelolaan Sampah Terpadu sebagai salah satu upaya pengelolaan Sampah Perkotaan adalah konsep rencana pengelolaan sampah perlu dibuat dengan tujuan mengembangkan suatu sistem pengelolaan sampah yang modern, dapat diandalkan dan efisien dengan teknologi yang ramah lingkungan.

*“.....,yah .. namanya sampah, pastilah ada yang mendukung ada yang tidak, tinggal bagaimana kita mampu mengelola dengan baik”* (ERN, Direktur Bank Sampah, Wawancara 28 Juli 2018)

Dalam sistem tersebut harus dapat melayani seluruh penduduk, meningkatkan standar kesehatan masyarakat dan memberikan peluang bagi masyarakat dan pihak swasta untuk berpartisipasi aktif. Pendekatan yang digunakan dalam konsep rencana pengelolaan sampah ini adalah



meningkatkan sistem pengelolaan sampah yang dapat memenuhi tuntutan dalam pengelolaan sampah yang berbasis peran serta masyarakat

*“....., faktor penghambatnya paling program pemerintah yang tidak berjalan efektif terutama program Makassar tidak rantasa’ belum berjalan dengan baik” (SUL, Pengangkut Sampah, Wawancara 29 Juli 2018).*

Pengkoordinasian merupakan bagian vital pekerjaan manajer. Selanjutnya, pengarahan berarti bahwa para manajer mengarahkan, memimpin dan mempengaruhi para bawahan. Manajer tidak melakukan pekerjaan tersebut dengan sendiri tetapi melakukan menyelesaikan pekerjaan dengan melalui orang lain.

*“....., Menurut saya, faktor penghambat itu adalah jumlah petugas kebersihan yang belum memadai.....” (SAM, Pengangkut Sampah, Wawancara 29 Juli 2018).*

Bila ada beberapa bagian organisasi pada jalur yang salah, maka manajer harus membetulkannya. Menurut Handoko, sebagai pekerja pada orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi: perencanaan, keorganisasian, penyusunan personalia atau kepegawaian, pengarahan dan kepemimpinan dan pengawasan

*“....., iye, menurut saya, masyarakat pengelola sampah sangat penting karena dalam mengelola sampah, maka penting dilakukan pemilahan sampai pemrosesan akhir (IRN, Masyarakat, Wawancara 29 Juli 2018).*

Praktik pengelolaan sampah berbeda beda antara negara maju dan negara berkembang, berbeda juga antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan dan antara daerah perumahan dengan daerah industri.

*“....., menurut saya kelompok masyarakat itu sangat penting karena dapat membantu dalam mengelola sampah (BAS, Masyarakat, Wawancara 29 Juli 2018).*

Pengelolaan sampah yang tidak berbahaya dari pemukiman dan institusi di area metropolitan biasanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sedangkan untuk sampah dari area komersial dan industri biasanya ditangani oleh perusahaan pengolah sampah

#### **4. Peran Pemerintah Sebagai Regulator**

*“....., menurut saya, masyarakat saat ini masih membutuhkan petugas kesehatan untuk saling bekerja sama dalam mengelola sampah” (Nas, Kepala UPTD Pengelola Sampah, Wawancara 28 Juli 2018)*

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kemandirian masyarakat adalah wujud dari pengembangan kemampuan ekonomi daerah untuk menciptakan kesejahteraan dan memperbaiki material secara adil dan merata yang ujungnya berpangkal pada pemberdayaan masyarakat.

*“....., belum mandiri, karena kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan sampah” (ERN, Direktur Bank Sampah, Wawancara 28 Juli 2018)*

Pemberdayaan masyarakat berdiri sendiri berlaku pada satu pemikiran bahwa pembangunan akan berjalan dengan sendirinya apabila masyarakat diberi hak mengelola sumberdaya masyarakatnya. Fungsi pemerintah dalam kaitanya dengan pemberdayaan yakni mengarahkan masyarakatnya pada kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran didalam kehidupan masyarakat

*“....., masyarakat saat ini sementara belajar untuk mandiri dalam mengelola sampahnya sendiri, karena pihak bank sampah mengklaim*

*bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah cukup baik, ini ditandai meningkatnya minat masyarakat untuk mengelola sampahnya sendiri dengan bekerja sama dengan pihak bank sampah” (SUL, Pengangkut Sampah, Wawancara 29 Juli 2018)*

Kota berwawasan lingkungan merupakan salah satu jawaban membangun kota yang lebih baik karena secara efisien menggunakan sumber daya kota. Hal ini dapat dilakukan dengan menekan penggunaan sumberdaya, meminimalkan jumlah limbah, mengurangi penggunaan air, udara, tumbuhan, fauna, pantai ataupun danau dengan komponen buatan jalan, bangunan, jembatan

*“....., kalo menurutku apa yang selama ini dilakukan oleh pemerintah sebagai regulator lumayan baikmi sisa bagaimana kita tingkatkan lagi kedepannya” (SAM, Pengangkut Sampah, Wawancara 29 Juli 2018)*

Pengelolaan sampah yang tidak berbahaya dari pemukiman dan institusi di area metropolitan biasanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sedangkan untuk sampah dari area komersial dan industri biasanya ditangani oleh perusahaan pengolah sampah

*“....., Peranna pemerintah saat ini cukupmilah Cuma perlu ditambah lagi armada pengangkut sampahnya karena biasanya itu sampah menumpuk sampai 3 hari baru diambil” (IRN, Masyarakat, Wawancara 29 Juli 2018).*

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan daur ulang atau pembuangan dari material sampah. Kalimat ini biasanya mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia, dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, atau estetika.

*“....., Menurut saya, peran pemerintah sebagai regulator baekmi tawwa Cuma perlu kerja sama yang baik khususnya kepada kitas ini sebagai masyarakat.....”* (BAS, Masyarakat, Wawancara 29 Juli 2018)

Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam (*resources recovery*). Pengelolaan sampah bisa melibatkan zat padat, cair, gas, atau radioaktif dengan metode dan keterampilan khusus untuk masing-masing jenis zat

### **C. Pembahasan**

Hasil dari pengolahan dan penyajian data yang telah dilakukan akan dibahas sesuai dengan variabel yang diteliti, yaitu sebagai berikut: Dalam melakukan peranan, masyarakat biasanya memberi fasilitas-fasilitas pada individu untuk dapat menjalankan peranan. lembaga-lembaga kemasyarakatan merupakan bagian masyarakat yang banyak menyediakan peluang-peluang untuk melaksanakan peranan. Selanjutnya dikatakan bahwa didalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan perannya atau kewajiban-kewajiabannya. Peranan-peranan dapat dilihat sebagai bagian dari struktur masyarakat sehingga struktur masyarakat dapat dilihat sebagai pola-pola peranan yang saling berhubungan (Soekanto, 2013:213).

Menurut After dalam Inu Kencana (2015:23) pemerintah itu merupakan satuan anggota yang paling umum yaitu memiliki tanggung jawab

tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya, dan monopoli praktis mengenai kekuasaan paksaan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama dalam studi ilmu politik gejala pemerintahan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari usaran kekuasaan. Bahkan menurut Kuper dalam Muhadam (2013:31) istilah *government* (pemerintah) dan segala bentuk merupakan jantung dari ilmu studi politik.

Sedangkan pemerintah menurut *Finer* dalam Muhadam (2013:14) setidaknya menunjukkan empat pengertian pokok yaitu pertama pemerintah merujuk suatu proses pemerintahan dimana kekuasaan dioperasionalkan oleh mereka yang memegang kekuasaan secara sah. Semua proses yang berlangsung dalam bingkai pengelolaan kekuasaan dipandang merupakan aktivitas yang menunjukkan pada performa pemerintah. Realitas ini dapat dilihat ketika seseorang menyadari bahwa semua aktivitas keteraturan dan ketertiban hingga urusan yang berbelit-belit dalam birokrasi merupakan mekanisme yang didesain secara sengaja oleh pemerintah. Kedua istilah pemerintah menunjuk pada keberadaan dimana proses pemerintahan tersebut berlangsung. Ketiga pemerintah menunjuk secara langsung person Keempat pemerintah juga dapat mengacu pada aspek bentuk, metode atau sistem pemerintah dalam suatu masyarakat, yakni struktur dan pengelolaan badan pemerintah serta hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah

Pengelolaan sampah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan daur ulang atau pembuangan dari material sampah. Kalimat ini biasanya mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia, dan biasanya

dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, atau estetika. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam (*resources recovery*).

Pengelolaan sampah bisa melibatkan zat padat, cair, gas, atau radioaktif dengan metode dan keterampilan khusus untuk masing-masing jenis zat. Praktik pengelolaan sampah berbeda beda antara negara maju dan negara berkembang, berbeda juga antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan dan antara daerah perumahan dengan daerah industri. Pengelolaan sampah yang tidak berbahaya dari pemukiman dan institusi di area metropolitan biasanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sedangkan untuk sampah dari area komersial dan industri biasanya ditangani oleh perusahaan pengolah sampah.

Metode pengelolaan sampah berbeda-beda tergantung banyak hal, di antaranya tipe zat sampah, lahan yang digunakan untuk mengolah, dan ketersediaan lahan. dan adapun Tujuan Pengelolaan sampah merupakan proses yang diperlukan. Proses pemilahan sampah yang masih memiliki nilai secara materiil untuk digunakan kembali disebut sebagai daur ulang (*reuse*). Ada beberapa cara daur ulang, pertama adalah mengambil bahan sampahnya untuk diproses lagi atau mengambil energi dari bahan yang bisa dibakar.

#### 1. Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah

Proses pemberdayaan masyarakat merupakan suatu program yang berkesinambungan. Pemberdayaan mengandung arti mengembangkan kondisi dan situasi sedemikian rupa sehingga masyarakat memiliki daya

dan kesempatan untuk mengembangkan kehidupannya. Pemberdayaan masyarakat menyangkut dua kelompok yang saling terkait yaitu masyarakat yang belum berkembang sebagai pihak yang harus diberdayakan, dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.

Semua proses yang berlangsung dalam bingkai pengelolaan kekuasaan dipandang merupakan aktivitas yang menunjukkan pada performa pemerintah. Realitas ini dapat dilihat ketika seseorang menyadari bahwa semua aktivitas keteraturan dan ketertiban hingga urusan yang berbelit-belit dalam birokrasi merupakan mekanisme yang didesain secara sengaja oleh pemerintah. Kedua istilah pemerintah menunjuk pada keberadaan dimana proses pemerintahan tersebut berlangsung. Ketiga pemerintah menunjuk secara langsung person Keempat pemerintah juga dapat mengacu pada aspek bentuk, metode atau sistem pemerintah dalam suatu masyarakat, yakni struktur dan pengelolaan badan pemerintah serta hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah

Peneliti menyimpulkan bahwa Salah satu masyarakat yang harus diberdayakan adalah masyarakat pemulung, karena sumber daya manusia pemulung dalam upaya peningkatan kualitas baik manusia sebagai insan maupun sebagai sumber daya pembangunan terasa semakin penting. Melihat kondisi di lapangan, kiranya perlu terobosan strategi dan langkah inovatif dalam melindungi dan memberdayakan pemulung, agar pemulung tidak selalu menjadi korban. Perencanaan matang harus berbasis daya dukung sumber daya alam dan lingkungan.

## 2. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

Sampah pada dasarnya merupakan suatu bahan yang terbuang atau di buang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia maupun proses-proses alam yang tidak mempunyai nilai ekonomi, bahkan dapat mempunyai nilai ekonomi yang negatif karena dalam penanganannya baik untuk membuang atau membersihkannya memerlukan biaya yang cukup besar.

Keberadaan sampah dalam jumlah yang banyak jika tidak dikelola secara baik dan benar, maka akan menimbulkan gangguan dan dampak terhadap lingkungan, baik dampak terhadap komponen fisik kimia (kualitas air dan udara), biologi, sosial ekonomi, budaya dan kesehatan lingkungan. Dampak operasional TPA terhadap lingkungan akan memicu terjadinya konflik sosial antar komponen masyarakat. Pada tahap pembuangan akhir/pengolahan, sampah akan mengalami pemrosesan baik secara fisik, kimia maupun biologis sedemikian hingga tuntas penyelesaian seluruh proses

Peneliti menyimpulkan bahwa keberadaan sampah dalam jumlah yang banyak jika tidak dikelola secara baik dan benar, maka akan menimbulkan gangguan dan dampak terhadap lingkungan, baik dampak terhadap komponen fisik kimia (kualitas air dan udara), biologi, sosial ekonomi, budaya dan kesehatan lingkungan. Dampak operasional TPA terhadap lingkungan akan memicu terjadinya konflik sosial antar komponen masyarakat.



### 3. Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator

Sampah dapat dimanfaatkan untuk menimbun lahan semacam rawa-rawa dan dataran rendah, sampah dapat dimanfaatkan sebagai pupuk, dapat diberikan untuk makanan ternak setelah menjalani proses pengelolaan yang telah ditentukan lebih dahulu untuk mencegah pengaruh buruk sampah tersebut terhadap ternak. Pengelolaan sampah yang kurang baik dapat memberikan pengaruh negatif yaitu *Pertama*, pengaruh terhadap kesehatan, diantaranya pengelolaan sampah yang kurang baik akan menjadikan sampah sebagai tempat perkembangbiakan vektor penyakit (seperti lalat, tikus, serangga, jamur); penyakit saluran pencernaan (diare, kolera dan typhus) disebabkan banyaknya lalat yang hidup berkembang biak di sekitar lingkungan tempat penumpukan sampah.

Peneliti menyimpulkan bahwa dalam melakukan peranan, masyarakat biasanya memberi fasilitas-fasilitas pada individu untuk dapat menjalankan peranan. lembaga-lembaga kemasyarakatan merupakan bagian masyarakat yang banyak menyediakan peluang-peluang untuk melaksanakan peranan. Selanjutnya dikatakan bahwa didalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan perannya atau kewajiban-kewajibannya.

#### 4. Peran Pemerintah Sebagai Regulator

Keberadaan sampah dalam jumlah yang banyak jika tidak dikelola secara baik dan benar, maka akan menimbulkan gangguan dan dampak terhadap lingkungan, baik dampak terhadap komponen fisik kimia (kualitas air dan udara), biologi, sosial ekonomi, budaya dan kesehatan lingkungan. Dampak operasional TPA terhadap lingkungan akan memicu terjadinya konflik sosial antar komponen masyarakat

Peneliti menyimpulkan bahwa harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan perannya atau kewajiban-kewajiabannya. Peranan-peranan dapat dilihat sebagai bagian dari struktur masyarakat sehingga struktur masyarakat dapat dilihat peranan yang saling berhubungan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengelolaan Sampah di Kota Makassar dengan jumlah sampel 6 orang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai fasilitator dalam pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah tentang peran pemerintah yang belum berjalan dengan baik.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai dinamisor dalam pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah tentang kelompok masyarakat pengelola sampah sudah berjalan dengan baik.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai regulator dalam pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah pada umumnya sudah berjalan dengan baik.

#### **B. Saran**

1. Diharapkan pada peneliti selanjutnya dapat memberikan informasi tentang peran pemerintah dalam pemberdayaan kelompok masyarakat dalam mengelola sampah
2. Diharapkan kepada pihak bank sampah agar lebih meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat dalam mengelola sampah

3. Diharapkan kepada masyarakat setempat agar kiranya bergotong royong untuk mewujudkan Makassar bersih dan tidak rantasa' sesuai dengan program pemerintah Kota Makassar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwas, Oos. M. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta
- Arif (2012), *Peran pemerintah dalam pembinaan masyarakat* : Bandung: Alfabeta
- Bachtiar, A.M. 2012. *Peranan Pemerintah Kecamatan dalam Pelaksanaan Pembangunan Partisipatif (Pembangunan Irigasi) di Kecamatan Masamba Kab. Luwu Utara*. Unismuh Makassar.
- Buku, *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian Dan Skripsi*. Fisipol Unismuh Makassar.
- Bungin, M. B. 2013. *Penelitian kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Putra Grafika.
- Friedman. M. M. 2012. *Family Nursing. Theory & Practice*. Jakarta: EGC
- Hakim, Lukman. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat: Sketsa Teori dan Pendekatan*. Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Labolo, Muhadam., 2013. *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Rajawali Pers.  
Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Jimmy, Ibrahim, 2012. *Prospek Otonomi Daerah*. Semarang: Dahara Prize.
- Kencana, Inu., 2012. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.  
2013. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung: Refika Aditama.  
2014. *Manajemen Ilmu Pemerintahan*, Bandung: Refika Aditama.
- Rozalik Abdullah, 2012. *Pelaksanaan otonomi luas dengan pemilihan kepala daerah secara langsung*. Jakarta : PT. Raja Grasindo.
- Sembiring, Masana., 2012. *Budaya Dan Kinerja Organisasi*, Bandung: Fokusmedia.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Soekanto, S . 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

UU NO .18 / 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Verawati, Tuti A., 2012. *Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat*  
Makassar: Universitas '45 Makassar

Sumber Internet :

Harahap, W, Syaiful. 2015 Harian sudut pandang. Sulawesi selatan

## LAMPIRAN I

### LEMBAR OBSERVASI

#### PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK MASYARAKAT PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA MAKASSAR

No. Responden :

#### A. Identitas Responden

1. Nama :

2. Umur :

3. Pekerjaan :

4. Alamat :

#### B. Pengelolaan Sampah

1. Sampah Kering

2. Sampah Basah

3. Limbah Kering

4. Limbah Basah

5. Keadaan Sampah Berserakan

6. Lingkungan Sekitar Dengan Penduduk Padat

## LAMPIRAN II

### PEDOMAN WAWANCARA

#### PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK MASYARAKAT PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA MAKASSAR

No. Responden :

##### **A. Identitas Responden**

1. Nama :
2. Umur :
3. Pekerjaan :
4. Alamat :

##### **B. Pertanyaan Tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengelolaan Sampah**

1. Bagaimana peran pemerintah dalam pengelolaan sampah?
2. Bagaimana peran pemerintah sebagai fasilitator dalam
  - a. Pemilahan
  - b. Pengumpulan
  - c. Pengangkutan
  - d. Pengolahan
  - e. Pemrosesan akhir sampah
3. Bagaimana peran pemerintah sebagai dinamisator dalam
  - a. Pemilahan
  - b. Pengumpulan



- c. Pengangkutan
  - d. Pengolahan
  - e. Pemrosesan akhir sampah
4. Bagaimana peran pemerintah sebagai regulator dalam
- a. Pemilahan
  - b. Pengumpulan
  - c. Pengangkutan
  - d. Pengolahan
  - e. Pemrosesan akhir sampah

## DOKUMENTASI PENELITIAN







## RIWAYAT HIDUP



**ZULFAHMI**, Lahir di Kaemba 01 April 1991, Anak ke dua dari empat bersaudara, Anak dari pasangan Muh. Rabbany Khalid dan Syumriati.

Penulis masuk jenjang pendidikan pertama di Sekolah Dasar Negeri No. 29 Inpres Kaemba. I Marusu Kabupaten Maros dan selesai pada tahun 2003, Kemudian melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Maros Kabupaten Maros dan selesai pada tahun 2007, Selanjutnya Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Marusu dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Alam dan selesai pada tahun 2010, Pada tahun 2011 memperoleh kesempatan untuk melanjutkan pendidikan Strata Satu (S1) Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Muhammadiyah Makassar dan menyelesaikan studinya pada tahun 2018.